



# **RANWAL RENJA**

# **DINKESPPKB**

## **Kabupaten Purbalingga**

## **Tahun 2027**



(0281) 891034



[dkk@purbalinggakab.go.id](mailto:dkk@purbalinggakab.go.id)



Jl. Letnan Jenderal S. Parman No. 21 Purbalingga

[www.dinkesppkb.purbalinggakab.go.id](http://www.dinkesppkb.purbalinggakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 dapat disusun dengan baik.

Renja ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam proses penyusunannya, Renja ini juga telah mengintegrasikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan. Melalui penerapan PUG, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, sehingga hasil pembangunan menjadi lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan perencanaan di masa yang akan datang. Besar harapan kami bahwa Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif gender.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga pelaksanaan Renja ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan gender.

Purbalingga, 16 Februari 2026

KEPALA DINKESPPKB  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
**dr. JUSTI FEBRIANTO, M.P.H**  
Pembina Tk I  
NIP. 19700219 200212 1 004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	73
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	75
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	119
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>127</b>
3.1 Telaahan dan Sasaran Kebijakan Nasional .....	127
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	131
3.3 Program dan Kegiatan .....	133
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>145</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>199</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah untuk menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam proses penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga berpedoman pada RKPD Kabupaten Purbalingga dan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi da pagu indikatif tahun berjalan serta prakiraan maju anggaran tahun depan.

Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran operasional tahunan dari Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Renja juga disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Purbalingga, sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah tahunan. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan sebagai dokumen penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan tahunan daerah.

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2027.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana selama satu tahun anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan; Menjamin keselarasan program dan kegiatan dengan RKPD; Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan; Menjadi dasar penyusunan RKA dan RAPBD; Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; Menjadi dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BABV PENUTUP**

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan, sekaligus mengukur capaian kinerja terhadap target Renstra Penstra Perangkat Daerah.

#### 2.1.1 Kinerja Anggaran

Tahun 2025 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp166.305.774.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp61.150.186.043,- atau 96,90% sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1 Capaian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>	<b>119.870.301.000</b>	<b>116.738.588.632</b>	<b>97,39</b>
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9.660.000	9.586.000	99,23
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.660.000	8.613.500	99,46
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	972.500	97,25
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>118.650.718.000</i>	<i>115.862.601.366</i>	<i>97,65</i>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	118.512.851.000	115.736.945.031	97,66
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.634.000	44.513.335	99,73
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	93.233.000	81.143.000	87,03
1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.800.000</i>	<i>100,00</i>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000	4.800.000	100,00
1.4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	6.000.000	1.987.500	33,13
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	0	0,00
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.987.500	99,38
1.5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	49.306.000	41.004.100	83,16
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerapan Bangunan Kantor	2.500.000	2.459.500	98,38
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.806.000	14.155.600	95,61
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.200.000	1.260.000	57,27
1.5.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	7.565.000	75,65
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000	10.764.000	97,85
1.5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.800.000	4.800.000	54,55
1.6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	68.379.000	57.175.000	83,61
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.379.000	57.175.000	83,61
1.7	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	704.087.000	539.357.490	76,60
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	64.000	8,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.604.000	218.926.766	71,64
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.691.000	9.459.856	97,61

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.992.000	310.906.868	80,13
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>377.351.000</i>	<i>222.077.176</i>	<i>58,85</i>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opreasional atau Lapangan	347.351.000	204.094.676	58,76
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	12.982.500	51,93
1.8.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>45.338.407.000</b>	<b>43.379.580.812</b>	<b>95,68</b>
2.1	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>13.255.189.000</i>	<i>12.180.507.116</i>	<i>91,89</i>
2.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	1.669.710.000	1.654.100.000	99,07
2.1.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	693.000.000	547.526.000	79,01
2.1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	952.000.000	665.865.489	69,94
2.1.4	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000	145.999.854	97,33
2.1.5	Pengadaan Obat, Bahan Habis pakai, Bahan Medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan	9.783.978.000	9.160.689.773	93,63
2.1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	5.210.000	5.035.000	96,64

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
2.1.7	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.291.000	1.291.000	100,00
2.2	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	32.030.929.000	31.155.529.306	97,27
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.217.000	73.172.030	75,27
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	121.700.000	60.350.000	49,59
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.000.000	8.210.870	68,42
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.215.000	16.868.540	92,61
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.035.000	37.368.520	86,83
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.150.000	16.108.500	88,75
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.240.000	10.840.000	96,44
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.200.000	8.121.500	99,04
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.300.000	8.281.500	99,78
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.116.000	5.106.196	99,81
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	93.800.000	84.948.866	90,56
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	182.000.000	174.337.426	95,79
2.2.13	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	213.400.000	163.506.511	76,62
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.814.000	29.895.000	81,21

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	152.000.000	148.135.845	97,46
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	267.211.000	205.581.500	76,94
2.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5.000.000	4.875.000	97,50
2.2.18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	234.485.000	222.192.250	94,76
2.2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.495.000	7.436.500	99,22
2.2.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.000.000	4.812.000	96,24
2.2.21	Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak Menular	261.000.000	245.992.931	94,25
2.2.22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.600.109.000	28.289.368.200	98,91
2.2.23	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	424.763.000	356.717.500	83,98
2.2.24	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.608.000	4.608.000	100,00
2.2.25	Operasional Pelayanan Puskesmas	373.347.000	190.231.204	50,95
2.2.26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	51.485.000	47.021.704	91,33
2.2.27	Investigasi Awal kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.180.000	5.105.000	98,55
2.2.28	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	253.429.000	215.355.214	84,98
2.2.29	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	516.630.000	510.980.999	98,91
2.3	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	40.364.000	31.626.290	78,35
2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40.364.000	31.626.290	78,35

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
2.4	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota</i>	11.925.000	11.918.100	99,94
2.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	3.750.000	3.743.500	99,83
2.4.2	Peningkatan tata kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.999.600	99,99
2.4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	3.175.000	3.175.000	100,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>768.389.000</b>	<b>743.820.506</b>	<b>96,80</b>
3.1	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	5.450.000	4.487.500	82,34
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3.700.000	2.737.500	73,99
3.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.750.000	1.750.000	100,00
3.2	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	82.059.000	74.117.000	90,32
3.2.1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7.508.000	3.795.500	50,55
3.2.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	74.551.000	70.321.500	94,33

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
3.3	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	680.880.000	665.216.006	97,70
3.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	680.880.000	665.216.006	97,70
<b>4</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>196.859.000</b>	<b>166.114.911</b>	<b>84,38</b>
4.1	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	6.183.000	6.000.000	97,04
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6.183.000	6.000.000	97,04
4.2	<i>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	4.350.000	4.312.500	99,14
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4.350.000	4.312.500	99,14
4.3	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	186.326.000	155.802.411	83,62

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
4.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	186.326.000	155.802.411	83,62
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>131.818.000</b>	<b>122.081.182</b>	<b>92,61</b>
5.1	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	33.040.000	33.035.000	99,98
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	33.040.000	33.035.000	99,98
5.2	<i>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	30.048.000	28.848.000	96,01
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.048.000	28.848.000	96,01
5.3	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	68.730.000	60.198.182	87,59
5.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	68.730.000	60.198.182	87,59
<b>TOTAL</b>		<b>166.305.774.000</b>	<b>161.150.186.043</b>	96,90

## 2.1.2 Kinerja Program dan Kegiatan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh	100%	100%	100%	96,15%	96,15%	96,15%	96,15%	100%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Fasyankes yang menerapkan PPK BLUD	96,15%	100%	100	96,15%	96,15%	96,15%	96,15%	100%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	83,10%	NA	78,87%	80,00%	101,43%	83%	83%	100%
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna	91,67%	86,44%	89,33%	84,13%	94,18%	90%	90%	100%
		Jumlah kematian ibu	6 orang	11 orang	10 orang	8 orang	125%	6 orang	6 orang	100%
		Jumlah kematian balita	125 orang	182 orang	160 orang	133 orang	120,30%	130 orang	130 orang	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Prevalensi wasting balita	4,09%	4,80%	8%	4,13%	193,70%	4,08%	4,08%	100%
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99,50%	99,78%	99,50%	100,14%	100,64%	99,50%	99,50%	100%
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	60%	NA	50%	54,29%	108,58%	55%	55%	100%
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	93%	90,90%	91%	84,80%	92,17%	92%	92%	100%
		Insidensi HIV	0,3 per 1000 penduduk	0,6 per 1000 penduduk	0,5 per 1000 penduduk	0,7 per 1000 penduduk	71,43%	0,4 per 1000 penduduk	0,4 per 1000 penduduk	100%
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	24,27%	10,40%	17,57%	17,99%	102,39%	20,92%	20,92%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	92%	58,33%	75%	56%	74,67%	88%	88%	100%
		Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	90%					85%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	100%	100%	100%	101,50%	101,50%	100%	100%	100%
		Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	100%		70%	99,03%	141,47%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	82%	77,43%	80%	79,17%	98,96%	81%	81%	100%
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase lanjut usia yang mandiri	97%	NA	75%	95,37%	127,16%	96%	96%	100%
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Depresi yang mendapat layanan	4,30%	1,50%	2%	3,30%	165%	3,80%	3,80%	100%
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	22%	NA	24%	15,68%	153,06%	23%	23%	100%
		Prevalensi Obesitas	9,50%	NA	22,50%	9,88%	228%	9,87%	9,87%	100%
		Persentase UKK yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan penemuan kasus TB	97%	106%	95%	94,03%	98,98%	96%	96%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	58%	46%	50%	46,12%	92,24%	54%	54%	100%
		Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Annual Parasite Incidence (API) Malaria	0,01 per 1000 penduduk	0,01 per 1000 penduduk	0,01 per 1000 penduduk	0,0086 per 1000 penduduk	116,72%	0,01 per 1000 penduduk	0,01 per 1000 penduduk	100%
		Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	70%	NA	50%	67%	134%	69%	69%	100%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	89,33%	88,73%	88,84%	88,73%	99,88%	88,93%	88,93%	100%
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan	98%	91,17%	92%	97,70%	106,20%	98%	98%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100%	132,50%	132,50%	100%	100%	100%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	100%	100%	100%	87,30%	87,30%	100%	100%	100%
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	62%	NA	38,19%	60,83%	62,78%	61%	61%	100%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	36%	NA	26,78%	33,29%	124,31%	35%	35%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	100%	100%	88,24%	100%	113,33%	100%	100%	100%
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup	91%	81,19%	89,50%	88,70%	99,11%	90%	90%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.02	Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,84%	94,60%	95,08%	95,35%	100,28%	95,46%	95,46%	100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi	89,0%	78,0%	78,50%	88,03%	112,14%	88,53%	88,53%	100%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama (MKUP)	21,30%	20,90%		20,90%		21%	21%	100%
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase terpenuhinya Program Bangga Kencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan	1,40%	1,40%	1,40%	20,30%	6,90%	1,40%	1,40%	100%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	18,90%	19,80%	19,80%			19,20%	19,20%	100%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	90,20%	90,01%	90,01%			90,01%	90,01%	100%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Proporsi Kampung KB Mandiri	0,84%		0,84%			0,84%	0,84%	100%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif	98%	84,97%	62,99%	97,95%	155,50%	98%	98%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan	71%	70,88%	70,88%	69,30%	97,77%	71%	71%	100%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	83,82%	83,68%	83,68%	83,68%	100%	83,68%	83,68%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2027	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2024	Target realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun lalu (n-2) Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD sampai tahun 2026	
					Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Realisasi 2025 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n- 1) Tahun 2026	Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan ditetapkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja yang berlaku perlu dilakukan penyesuaian. Perjanjian Kinerja perubahan disusun sebagai bentuk penyelarasan terhadap arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, dengan tetap menjaga kesinambungan capaian kinerja pada periode sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Secara rinci analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Utama Tahun 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan layanan kesehatan berkualitas baik, adil dan terjangkau		Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,23	74,48	100,34
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	angka	87,31	88,24	101,07
			Persentase Penurunan Kasus Kematian Ibu	persen	9,09	27,27	300,03
			Angka Kematian Balita	per 1000 KH	15,3	12,71	120,39
			Prevalensi Stunting	persen	22,1	22,3	99,10
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	persen	81,82	100	122,22
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	persen	9,09	0	0,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk	per 1000 penduduk	2,43	2,48	102,25
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar	persen	88,31	85,91	97,28
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	angka	74	74,21	100,28
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>114,30</b>		
<b>Predikat Kinerja</b>					<b>Sangat Tinggi</b>		

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

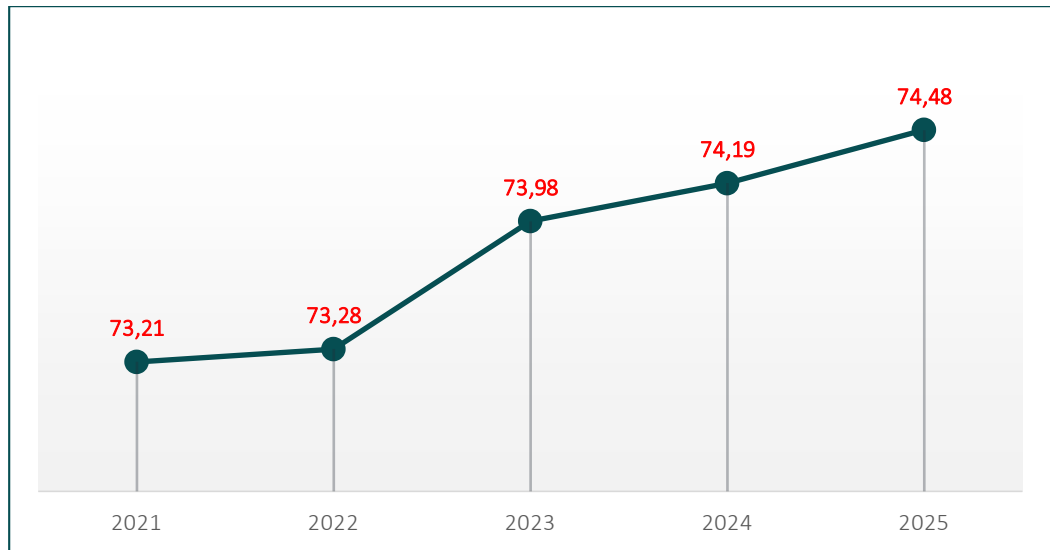
## 1. Capaian Indikator Tujuan

### a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Tujuan yang tercantum dalam perubahan perjanjian Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah Terwujudnya masyarakat yang sehat dan layanan kesehatan berkualitas baik, adil dan terjangkau dengan indikator tujuan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH). Capaian kinerja tujuan diukur dengan membandingkan target tahun 2025 dengan realisasi tahun 2025, dengan capaian sebesar 100,34%. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebesar 74,48 tahun merupakan data *release* dari BPS Kabupaten Purbalingga.

Tren Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Purbalingga selama lima tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

**Grafik 2. 1 Tren Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025**



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Faktor yang menjadi kendala peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Purbalingga di antaranya:

1) Sarana Prasarana Kesehatan

Kabupaten Purbalingga memiliki 23 Puskesmas yang tersebar di seluruh Kecamatan yang terdiri dari 12 Unit Puskesmas Rawat Jalan dan 11 Unit Puskesmas Rawat Inap. Namun jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa rasio penduduk untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 penduduk maka untuk mencapai target tersebut berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025 Kabupaten Purbalingga masih kekurangan 12 unit Puskesmas baru untuk mencapai kondisi ideal. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah Puskesmas seperti peningkatan status Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas induk.

Persebaran lokasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit) belum merata, masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dimana di Kabupaten Purbalingga terdapat 9 Unit terdiri dari 7 Rumah Sakit Umum dan 2 Rumah Sakit Ibu dan Anak, sehingga masyarakat di wilayah bagian utara Kabupaten Purbalingga seperti Kecamatan Karangjambu dan Rembang masih terlalu jauh untuk mengakses layanan kesehatan lanjutan.

2) Masih adanya penduduk miskin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 12,55%. Penduduk miskin memiliki akses terbatas terhadap Pendidikan dan informasi kesehatan, sehingga kurang mampu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan.

### 3) Tingginya Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting Kabupaten Purbalingga adalah 22,1% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGI) yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Masih tingginya prevalensi stunting mencerminkan permasalahan gizi kronis pada ibu dan anak yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan, meningkatkan risiko kesakitan, penyakit degeneratif, dan kematian dini, sehingga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya Usia Harapan Hidup (UHH).

### 4) Masih Adanya Kasus Kematian Ibu dan Balita

Pada Tahun 2025 terdapat 8 kasus kematian ibu dan 133 kasus kematian balita. Masih adanya kasus kematian ibu dan balita berdampak langsung terhadap penurunan nilai Usia Harapan Hidup (UHH), karena kematian pada kelompok usia reproduktif dan usia dini mencerminkan belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk upaya pencegahan, deteksi dini faktor risiko, dan penanganan komplikasi secara tepat dan berkesinambungan.

### 5) Masih Tingginya Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular

Masih tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular menjadi faktor penghambat peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), karena meningkatkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian dini, serta mencerminkan belum optimalnya upaya promotif, preventif, dan pengendalian faktor risiko kesehatan di masyarakat.

Kendala tersebut menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Usia Harapan Hidup yaitu:

1) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH).

Di tahun 2025 telah beroperasi Puskesmas baru yakni Puskesmas Kemangkong 2, sehingga jumlah Puskesmas di Kabupaten Purbalingga sebanyak 23 Puskesmas yang tersebar di seluruh Kecamatan. Selain Puskesmas terdapat fasilitas kesehatan lain yang terdapat di Kabupaten Purbalingga. Berikut ini jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Rumah Sakit	9
2.	Puskesmas	23
3.	Klinik Utama	2
4.	Klinik Pratama	25
5.	Labkes	3
6.	TPMD	174
7.	Praktik Mandiri Bidan	122
8.	Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan	27
9.	Penyehat tradisional	20
10.	Unit Pengelola Darah	1

*Sumber: Registrasi Fasyankes*

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi. Akreditasi fasyankes menjadi instrumen strategis dalam menjamin standar mutu dan keselamatan pasien, melalui pemenuhan standar pelayanan, tata kelola manajemen, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. Hal ini berdampak pada perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan

dan usia harapan hidup masyarakat. Dari Total Fasyankes di Kabupaten Purbalingga sebanyak 63 unit (23 Puskesmas, 9 Rumah Sakit, 27 Klinik, 3 Laboratorium kesehatan, 1 Unit Transfusi Darah) dengan Fasyankes status akreditasi minimal madya sebanyak 58 fasyankes (22 Puskesmas, 9 Rumah Sakit, 23 Klinik, 3 Laboratorium kesehatan, 1 Unit Transfusi Darah) terdapat 1 Puskesmas dan 4 Klinik belum terakreditasi dikarenakan baru beroperasi di Tahun 2025.

2) Ketersediaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai ASN dan Non ASN. Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar.

Berikut persebaran tenaga medis dan tenaga kesehatan menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 5 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>JENIS KETENAGAAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Tenaga Medis</b>	<b>190</b>	<b>260</b>	<b>450</b>
	Dokter	93	160	253
	Dokter Gigi	16	52	68
	Dokter Spesialis	77	45	122
	Dokter Gigi Spesialis	4	3	7
<b>2</b>	<b>Tenaga Psikologi Klinis</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Tenaga Keperawatan</b>	<b>452</b>	<b>972</b>	<b>1424</b>
<b>4</b>	<b>Tenaga Kebidanan</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>771</b>
<b>5</b>	<b>Tenaga Kefarmasian</b>	<b>76</b>	<b>313</b>	<b>389</b>
	Apoteker	51	190	241
	Tenaga Teknis Kefarmasian	25	123	148
<b>6</b>	<b>Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>	<b>25</b>	<b>73</b>	<b>98</b>
<b>7</b>	<b>Tenaga Kesehatan Lingkungan</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>57</b>

NO	JENIS KETENAGAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
8	Tenaga Gizi	4	53	57
9	Tenaga Keterampilan Fisik	10	15	25
	Fisioterapis	9	6	15
	Terapis Okupasional	1	4	5
	Terapis Wicara	0	4	4
	Akupuntur	0	1	1
10	Tenaga Keteknisian Medis	45	126	171
11	Tenaga Teknik Biomedika	66	120	186
	Radiografer	24	25	49
	ATLM	35	92	127
	Fisikawan Medik	2	1	3
	Ortotik Prostetik	0	0	0
12	Tenaga Kesehatan Tradisional	0	0	0
13	Nakes Lainnya	1	4	5
14	Asisten Tenaga Kesehatan	23	111	134
15	Tenaga Penunjang	702	610	1312
<b>Total</b>		<b>1614</b>	<b>3456</b>	<b>5070</b>

Sumber: SISDMK

**Tabel 2. 6 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Persebarannya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

NO	UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	37	68	105
2	Rumah Sakit	1018	1784	2802
3	Puskesmas	335	946	1281
4	Labkeskab	8	9	17
5	Klinik	87	211	298
6	Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1614</b>	<b>3456</b>	<b>5070</b>

Sumber: SISDMK

3) Pelaksanaan program Integrasi Pelayanan Primer (ILP)

Integrasi Pelayanan Primer (ILP) merupakan salah satu dari enam pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Integrasi Pelayanan Primer menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 tahun 2023 adalah sebuah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai Pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perorangan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan ILP untuk mendekatkan akses dan Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat. Kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan Integrasi Pelayanan Primer (ILP) di 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga, 1 Puskesmas baru beroperasi di bulan Desember 2025.

#### 4) Pelaksanaan Program Speling (Dokter Spesialis Keliling)

Program Speling (Dokter Spesialis Keliling) adalah layanan kesehatan inovatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendekatkan dokter spesialis ke pedesaan. Program ini bertujuan mempermudah akses warga terpencil mendapatkan konsultasi gratis, pemeriksaan kandungan (*obgyn*), paru, dan penyakit dalam, sekaligus menekan angka rujukan rumah sakit.

Dinas Kesehatan telah bekerja sama dengan Rumah Sakit di Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan program Speling. Pada tahun 2025 sebanyak 28 Desa/Kelurahan sudah mendapatkan pelayanan Speling. Dengan adanya Program Speling mendukung upaya pemerintah daerah dalam pemerataan akses layanan kesehatan serta pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan terutama indikator Usia Harapan Hidup.

#### 5) Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, memiliki akses yang setara dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 1.066.060 atau 100,14% dari total penduduk 1.064.475 jiwa. Dari jumlah tersebut, 737.600 atau 69,19% merupakan peserta JKN bagi penduduk

miskin. Realisasi tersebut sesuai dengan target capaian *Universal Health Coverage (UHC)* yaitu minimal 95% dari jumlah penduduk.

**Tabel 2. 7 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

URAIAN	2025
1	2
<b>BPJS</b>	<b>1.066.060</b>
a. BPJS PBI	737.600
b. BPJS Non PBI	328.460

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target *Universal Health Coverage (UHC)*. Anggaran JKN yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp28.061.966.600,-, yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp26.966.381.200,- dan Rp1.095.585.400,- untuk membayar bantuan iuran JKN peserta PBP dan BP kelas 3. Capaian *Universal Health Coverage (UHC)* pada Desember tahun 2025 sebesar 100,14% dari total penduduk di Kabupaten Purbalingga, dimana 79,17% diantaranya adalah peserta aktif.

Berikut ini merupakan kepesertaan JKN tahun 2025 berdasarkan jenis kepesertaannya:

**Tabel 2. 8 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Jenis Kepesertaannya Tahun 2025**

JENIS KEPESERTAAN	2025
1	2
PBI APBN	611.051
PBI APBD	126.549
Bukan Pekerja	18.117
Pekerja Bukan Penerima Upah	98.210
Pekerja Penerima Upah Badan Usaha	160.034

Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara	52.045
--	--------

#### 6) Perbaiki Status Gizi Masyarakat

Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu upaya dalam peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Upaya perbaikan gizi dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan stunting, gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan konsumsi gizi seimbang, suplementasi gizi bagi kelompok rentan, serta edukasi perilaku hidup sehat. Status gizi yang baik mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan menjaga kualitas kesehatan sepanjang siklus hidup, sehingga secara berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH).

Upaya perbaikan status gizi masyarakat yang telah dilakukan diantaranya:

- a) Pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil dan remaja putri
- b) Pemberian ASI eksklusif
- c) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita gizi bermasalah
- d) Pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk keperluan Medis Khusus ) umur > 1 tahun
- e) Pertemuan dan pembinaan pelayanan pengelolaan gizi masyarakat pada tenaga kesehatan dan lintas sector
- f) Pelaksanaan program Dokter Spesialis Keliling (Speling)

#### 7) Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui Pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita yang semakin optimal berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sehingga berdampak positif terhadap Usia Harapan Hidup (UHH).

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak diantaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan melakukan pembinaan dan pertemuan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan,

komitmen bersama antara Dinas kesehatan dan faskes baik Puskesmas maupun semua Rumah Sakit dalam menurunkan kematian Ibu, bayi dan balita.

#### 8) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan faktor strategis dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH), karena berperan langsung dalam menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian dini. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai intervensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pada aspek promotif dan preventif, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga telah melakukan penguatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Germas, serta deteksi dini faktor risiko penyakit menular dan tidak menular melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Upaya ini bertujuan mencegah timbulnya penyakit sejak dini sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif.

Dalam pengendalian penyakit menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga telah melakukan surveilans epidemiologi secara rutin, imunisasi dasar dan lanjutan, penemuan kasus secara aktif, serta pengobatan sesuai standar. Penguatan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa (KLB) dan respons cepat turut berkontribusi dalam menekan angka kematian akibat penyakit menular.

#### 9) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan upaya strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit menular dan tidak menular melalui perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat.

Upaya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang telah dilaksanakan melalui kegiatan promotif dan preventif berupa edukasi kesehatan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat di tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat umum. Kegiatan tersebut mencakup penerapan kebiasaan cuci tangan pakai

sabun, penggunaan jamban sehat, konsumsi air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, aktivitas fisik teratur, serta perilaku tidak merokok.

Selain itu, dalam pelaksanaan penguatan PHBS dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan peran aktif kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta institusi pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup sehat. Pendataan telah dilakukan terhadap 311.214 Rumah tangga dengan hasil Rumah Tangga Sehat 296.727 Rumah Tangga (95,35%). Monitoring dan evaluasi penerapan PHBS secara berkala tetap dilakukan untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku di masyarakat.

#### 10) Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan

Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga telah melakukan stimulan jamban yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun jamban sehat kepada 50 Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi dan kesehatan masyarakat.

Pada Tahun 2025, paket stimulan jamban sejumlah 50 paket untuk 5 (lima) desa/kelurahan yaitu:

- a) Desa Pengadegan Kec. Pengadegan : 16 paket
- b) Desa Majasari Kec. Bukateja : 24 paket
- c) Desa Karangturi Kec. Kalimanah : 4 paket
- d) Desa Blater Kec. Kalimanah : 4 paket
- e) Kelurahan Wirasana Kec. Purbalingga : 4 paket

## 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

### a. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Serta Pemerataan Layanan Kesehatan

#### 1) Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan

Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan diukur dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdiri dari 9 unsur layanan. Survei Kepuasan Masyarakat melalui website <https://skm.purbalinggakab.go.id/>.

Cakupan Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 88,24%. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sebesar 87,31% sehingga capaian kinerja sebesar 101,07% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 88,24% yang dapat diartikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dinilai Sangat baik.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan yaitu terdapat 3 unsur pelayanan dengan nilai tertinggi diantaranya sebagai berikut:

a) Unsur Biaya / Tarif

- (1) Adanya transparansi tarif pelayanan baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun Labkeskab sehingga masyarakat mudah mengakses tarif layanan di Rumah Sakit, Puskesmas maupun Labkeskab secara *online* maupun *offline*.
- (2) Penetapan tarif layanan mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Unsur Persyaratan

- (1) Informasi persyaratan layanan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkeskab mudah diakses oleh masyarakat
- (2) Adanya sistem pendaftaran dan administrasi yang mempermudah pemenuhan persyaratan
- (3) Persyaratan pendaftaran mudah diakses, bisa melalui pendaftaran *online* maupun *offline*

c) Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- (1) Tersedianya berbagai kanal pengaduan (kotak saran, nomor pengaduan, media sosial, *website* Lapor Masbup)
- (2) Adanya SOP penanganan pengaduan yang jelas dan terdokumentasi
- (3) Pengaduan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur

Hambatan dalam pencapaian Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan yaitu terdapat 3 unsur pelayanan dengan nilai terendah diantaranya sebagai berikut:

- a) Unsur Waktu Penyelesaian
  - (1) Penumpukan pasien pada jam dan waktu tertentu
  - (2) Masyarakat belum semuanya terpapar terkait pendaftaran secara *online* baik di Rumah Sakit dan Puskesmas
- b) Unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan
  - (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami jenis dan spesifikasi layanan yang tersedia di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkeskab
  - (2) Penerapan standar pelayanan dan SOP
- c) Unsur sarana dan Prasarana
  - (1) Belum semua fasyankes memiliki Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar
  - (2) Pemeliharaan sarana dan prasarana belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan sebagai berikut:

- a) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar tarif pelayanan
- b) Sosialisasi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jenis dan spesifikasi layanan ke masyarakat secara *online* dan *offline*
- c) Telah tersusunnya daftar jenis layanan kesehatan sesuai kewenangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkeskab.
- d) Adanya Standar Pelayanan dan SOP untuk setiap jenis layanan

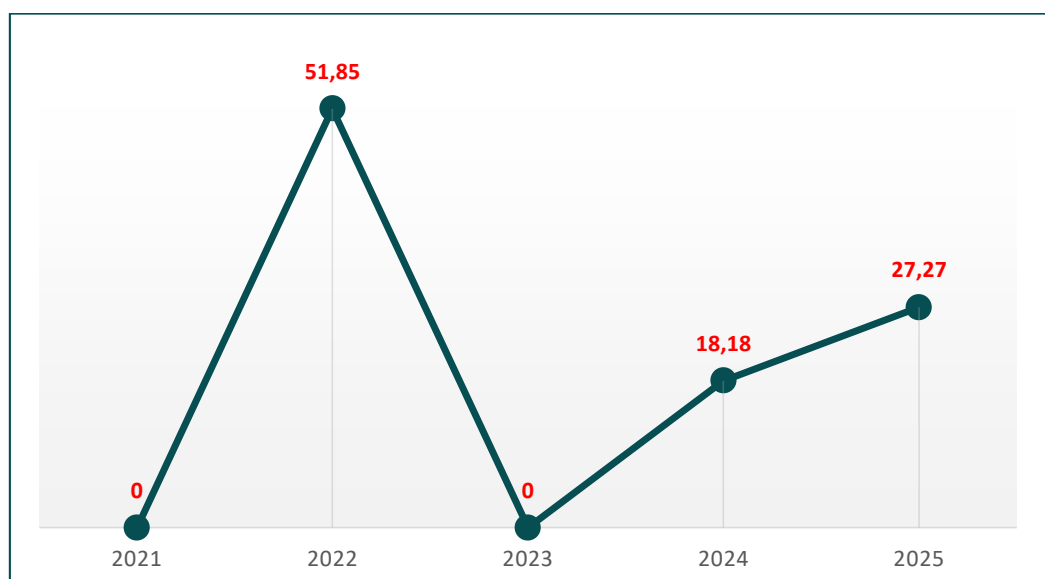
- e) Informasi jenis dan spesifikasi layanan mudah diakses oleh masyarakat, adanya media informasi di media sosial dan baner atau papan informasi di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkeskab
- f) Menindaklanjuti pengaduan dari berbagai kanal (kotak saran, nomor pengaduan, media sosial, *website* Lapor Masbup)
- g) Adanya SOP penanganan pengaduan yang jelas dan terdokumentasi
- h) Pelaksanaan bimbingan teknis ke tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait kesehatan
- i) Melakukan pengadaan sarana prasarana menggunakan anggaran BLUD

## 2) Persentase Penurunan Kematian Ibu

Persentase penurunan kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 27,27% dengan 8 kasus kematian ibu. Jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yaitu 9,09% maka capaian persentase penurunan kematian ibu mencapai 300,03% termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

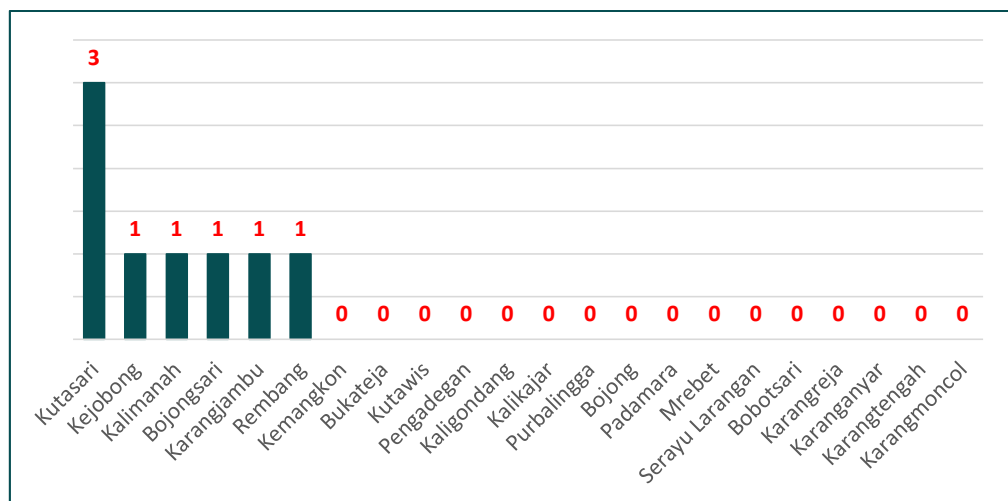
Tren capaian persentase penurunan kematian ibu di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Grafik 2. 2 Tren Persentase Penurunan Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025**



Jumlah kematian ibu terdapat di Puskesmas Kutasari sebanyak 3 kasus. Puskesmas dengan catatan 1 kasus kematian yaitu Puskesmas Kejobong, Puskesmas Kalimanah, Puskesmas Bojongsari, Puskesmas Karangjambu, Puskesmas Rembang dan sisanya tidak ada kasus kematian.

**Grafik 2. 3 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Wilayah Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**



Penyebab kematian ibu adalah disebabkan karena Perdarahan ada 4 kasus diikuti karena komplikasi Non Obstetrik 4 kasus. Tempat kematian 8 kasus di Rumah Sakit. Sebanyak 4 kasus meninggal di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata, 3 kasus meninggal di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan 1 kasus meninggal di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja persentase penurunan kematian ibu diantaranya sebagai berikut:

- a) Penguatan pelayanan kesehatan ibu
- b) Pemanfaatan program inovasi pelayanan seperti program Dokter Spesialis Keliling (Speling)
- c) Dukungan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional
- d) Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan hasil audit maternal
- e) Peningkatan peran lintas sector dan masyarakat

Beberapa kendala yang dihadapi pada saat upaya penurunan kematian ibu antara lain:

- a) Masih tingginya kasus ibu hamil risiko tinggi terutama ibu hamil dengan anemia dan ibu hamil dengan penyakit kronis lain
- b) Penyebab kematian karena perdarahan masih tinggi
- c) Penanganan kasus di Rumah Sakit belum optimal, terutama penanganan kegawatdaruratan perdarahan
- d) Skrining layak hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) belum optimal

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penurunan Angka Kematian Ibu di antaranya sebagai berikut:

- a) Pemenuhan alat kesehatan penunjang pelayanan kesehatan ibu hamil
- b) Pelaksanaan program Dokter Spesialis Keliling (Speling)
- c) Melakukan Audit kasus kematian ibu dan tindak lanjut hasil rekomendasi *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMPSR)*
- d) Melakukan skrining pada semua ibu hamil di Trimester pertama dan Trimester Ketiga kehamilan serta melakukan pemantauan dan pendampingan pada ibu hamil risiko tinggi
- e) Melakukan evaluasi hasil rekomendasi *Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMPSR)* di Rumah Sakit
- f) Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) dan *Multiple Micronutrient Supplement (MMS)* serta melakukan pemantauan minum TTD/MMS
- g) Meningkatkan kualitas pelayanan *Maternal Neonatal* di Rumah Sakit
- h) Meningkatkan pelayanan bank darah di Rumah Sakit
- i) Meningkatkan kualitas pelayanan *Antenatal Care (ANC)*
- j) Pelaksanaan kelas ibu hamil
- k) Meningkatkan Skrining Layak Hamil pada Pasangan Usia Subur (PUS) dan Calon Pengantin
- l) Meningkatkan Layanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP)

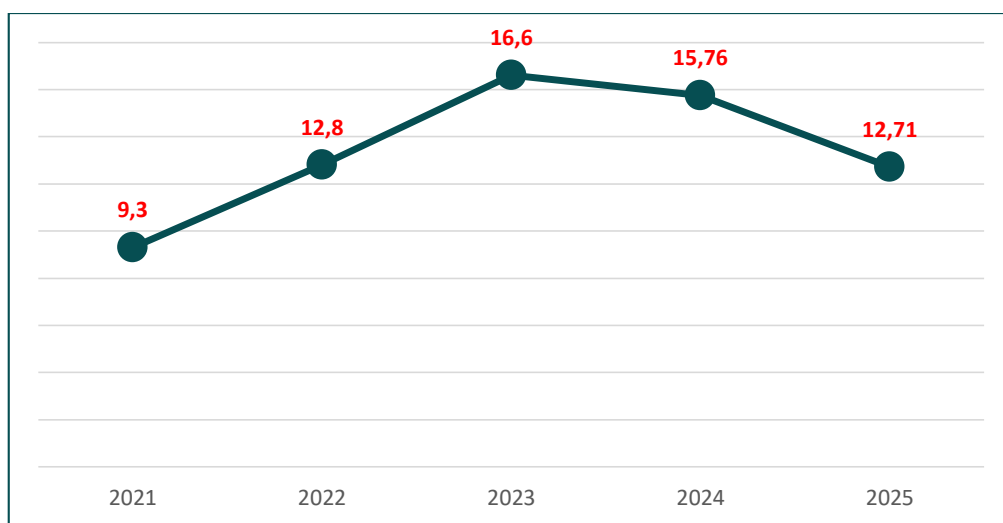
### 3) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 12,71 per 1.000 KH dengan 133 kasus kematian. Jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yaitu

15,3 per 1.000 KH maka capaian Angka Kematian Balita mencapai 120,39% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

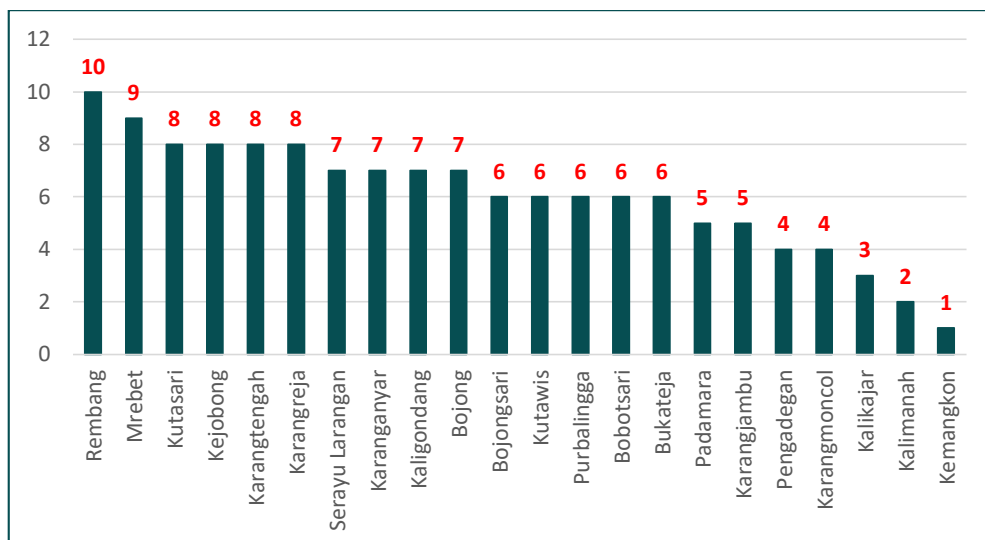
Tren capaian AKBA di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Grafik 2. 4 Tren Angka Kematian Balita di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025**



Kasus kematian balita di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebanyak 133 kasus dengan jumlah kasus kematian balita usia 12-59 bulan sebanyak 10 kasus. Dari 22 Puskesmas di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian balita yang tertinggi terdapat di Puskesmas Bojongsari dengan jumlah 10 kasus dan kematian balita terendah terdapat di Puskesmas Bojong dengan jumlah 1 kasus kematian.

**Grafik 2. 5 Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Wilayah Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**



Penyebab kematian balita yang terjadi pada usia 0-28 hari diantaranya BBLR sebanyak 4 kasus, Prematur sebanyak 32 kasus, Asfiksia sebanyak 13 kasus, Sepsis sebanyak 7 kasus, Infeksi sebanyak 1 kasus, Kelainan kongenital sebanyak 9 kasus, kelainan cardiovascular sebanyak 10 kasus dan lain-lain (RDS, kongenital pneumonia, dll) sebanyak 15 kasus.

Penyebab Kematian balita pada usia 29 hari sampai dengan 11 bulan diantaranya kondisi perinatal sebanyak 3 kasus, Pneumonia sebanyak 2 kasus, Diare sebanyak 1 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 5 kasus, kelainan kongenital lain sebanyak 2 kasus, meningitis sebanyak 5 kasus, infeksi sebanyak 4 kasus, dan lain-lain (sepsis, ISPA, epilepsy,dll) sebanyak 12 kasus.

Penyebab kematian yang terjadi pada usia 12-59 bulan yaitu disebabkan oleh Pneumonia sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 1 kasus, kelainan kongenital lainnya 1, penyakit syaraf sebanyak 1 kasus, penyebab lainnya sebanyak 5 kasus diantaranya disebabkan oleh sepsis, meningitis, radang paru-paru, Neoplasma Maligna ginjal, mual dan muntah.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Balita antara lain:

- a) Penguatan pelayanan kesehatan bayi dan balita

- b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
- c) Pemanfaatan program inovasi pelayanan seperti program Dokter Spesialis Keliling (Speling)
- d) Dukungan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional
- e) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- f) Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap

Hambatan dalam pencapaian kinerja pada pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Balita antara lain:

- a) Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, dan bayi baru lahir.
- b) Keterlambatan deteksi dini dan penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, dan neonatal.
- c) Masih adanya kasus bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas.
- d) Masalah gizi ibu hamil dan bayi yaitu ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan ibu hamil dengan anemia serta bayi gizi kurang
- e) Rendahnya pengetahuan dan perilaku kesehatan keluarga, termasuk praktik perawatan bayi baru lahir dan tanda bahaya pada balita
- f) Masih adanya penyakit penyerta pada balita (ISPA, diare, pneumonia, TBC)

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penurunan Angka Kematian Balita diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan Audit kasus kematian bayi dan tindak lanjut hasil rekomendasi AMPSR
- b) Melakukan skrining bayi baru lahir (Skrining penyakit Jantung Bawaan, Skrining Hipotiroid kongenital, skrining G6PD, Skrining Hiperplasia Adreanan dan skrining kelainan empedu)
- c) Peningkatan kapasitas bidan di RS dan Puskesmas ( *In House Training* Pelayanan kesehatan ibu dan anak)
- d) Meningkatkan kualitas kunjungan neonatal
- e) Pendampingan Dokter Spesialis anak ke Puskesmas
- f) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Anak terintegrasi (PKAT) di puskesmas

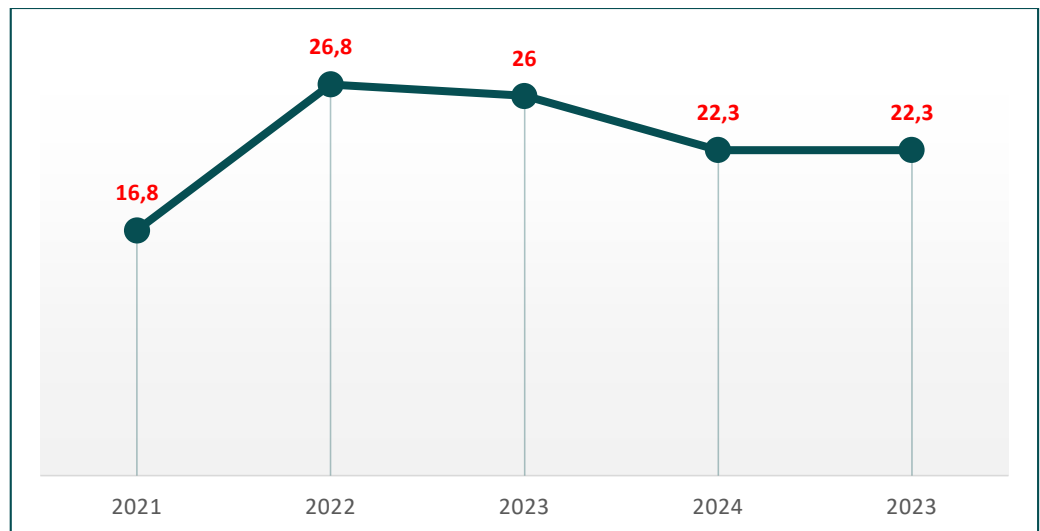
- g) Meningkatkan kualitas pelayanan Maternal Neonatal di RS
- h) Meningkatkan kualitas pelayanan ANC
- i) Meningkatkan Skrining Layak Hamil pada PUS dan Catin
- j) Optimalisasi pelaksanaan SDIDTK dan pemanfaatan buku KIA
- k) Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap
- l) Pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita

#### 4) Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 22,3%. Jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yaitu 22,1% maka capaian Prevalensi Stunting mencapai 99,01% termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Berikut ini tren capaian Prevalensi Stunting berdasarkan hasil survei nasional (SKI/SSGI) dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Grafik 2. 6 Tren Prevalensi Stunting Berdasarkan Hasil Survei Nasional (SKI/SSGI) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025**



Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan pada tahun 2024, Kabupaten Purbalingga menempati posisi kelima dengan Prevalensi Stunting tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja Prevalensi Stunting adalah sebagai berikut:

- a) Masalah Kesehatan Ibu Hamil dan Remaja Putri, adanya anemia pada

ibu hamil dan remaja putri, kehamilan berisiko, serta jarak kehamilan yang terlalu dekat berdampak pada status gizi janin dan pertumbuhan anak.

- b) Koordinasi dan Peran Lintas Sektor Belum Maksimal
- c) Masih rendahnya pengetahuan, pendidikan dan pola asuh serta ekonomi yang rendah masyarakat
- d) Asupan Gizi 1000 HPK ( Seribu Hari Pertama Kehidupan) tidak mencukupi
- e) Pemberian MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang belum berkualitas ( kesadaran mengkonsumsi protein hewani masih rendah ) dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) belum optimal
- f) IMD dan ASI eksklusif yang belum bagus karena banyak ibu bekerja di Kabupaten Purbalingga
- g) Pemantauan pertumbuhan dan Perkembangan blum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penurunan Prevalensi Stunting diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil dan remaja putri
- b) Pelaksanaan kelas ibu hamil dan balita
- c) Edukasi ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai standar
- d) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita gizi bermasalah
- e) Pemberian PKMK (Pangan Olahan untuk keperluan Medis Khusus ) umur > 1 tahun
- f) Pertemuan dan pembinaan pelayanan pengelolaan gizi masyarakat pada tenaga kesehatan dan lintas sektor
- g) Pelaksanaan program Dokter Spesialis Keliling (Speling)
- h) Peningkatan akses air minum layak dan sanitasi berbasis masyarakat

## **5) Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)**

Definisi Operasional Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah persentase Puskesmas dengan indeks SPM Hipertensi dan DM >80%, angka depresi pada usia  $\geq 15$  tahun tidak lebih dari 1 % dan peraturan kepala daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 100%. Target perjanjian kinerja perubahan yang ditetapkan 81,82% sehingga capaian kinerja sebesar 122,22% termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Berikut perhitungan Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2. 9 Persentase Indeks SPM Hipertensi, Diabetes Melitus dan Angka Depresi pada usia ≥15 tahun Serta Perbup KTR**

NO	PUSKESMAS	SPM HIPERTENSI			SPM DIABETES MELITUS			ANGKA DEPRESI PADA USIA ≥15 TAHUN			PERATURAN KTR
		SASARAN	CAPAIAN	%	SASARAN	CAPAIAN	%	SASARAN	CAPAIAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kemangkon	15.209	15.209	100	903	903	100	52.711	14	0,03	Peraturan Bupati No.42 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2	Bukateja	9.871	9.871	100	593	593	100	34.190	4	0,01	
3	Kutawis	8.622	8.622	100	512	512	100	30.007	5	0,02	
4	Kejobong	12.367	12.367	100	732	732	100	42.446	3	0,01	
5	Pengadegan	9.092	9.092	100	589	589	100	34.572	13	0,04	
6	Kaligondang	9.559	9.559	100	568	568	100	33.233	0	0	
7	Kalikajar	6.199	6.199	100	368	368	100	21.614	1	0	
8	Purbalingga	9.067	9.067	100	541	541	100	31.550	15	0,05	
9	Bojong	4.495	4.495	100	267	267	100	15.607	0	0	
10	Kalimanah	13.378	13.378	100	794	794	100	46.656	3	0,01	
11	Padamara	10.628	10.628	100	631	631	100	37.014	0	0	
12	Kutasari	15.538	15.538	100	913	913	100	53.451	4	0,01	
13	Bojongsari	15.493	15.493	100	884	884	100	51.327	1	0	
14	Mrebet	9.802	9.802	100	582	582	100	33.946	11	0,03	
15	Serayu Larangan	8.688	8.688	100	516	516	100	30.152	0	0	
16	Bobotsari	12.780	12.780	100	757	757	100	43.920	3	0,01	
17	Karangreja	11.196	11.196	100	641	641	100	37.552	0	0	
18	Karangjambu	6.541	6.541	100	391	391	100	22.665	1	0	
19	Karanganyar	9.681	9.681	100	574	574	100	33.526	1	0	
20	Karangtengah	8.867	8.867	100	523	523	100	30.661	13	0,04	
21	Karangmoncol	13.942	13.942	100	825	825	100	48.002	0	0	
22	Rembang	16.125	16.125	100	956	956	100	56.009	3	0,01	
<b>KABUPATEN</b>		<b>237.140</b>	<b>237.140</b>	<b>100</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>	<b>100</b>	<b>820.811</b>	<b>95</b>	<b>0,01</b>	

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh Puskesmas memiliki Capaian SPM Hipertensi dan DM sebesar 100% dan Angka Depresi pada usia  $\geq 15$  tahun di seluruh Puskesmas yaitu  $<1\%$ , sehingga Realisasi Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Purbalingga sebesar 100%. Untuk Indikator peraturan kepala daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tertuang pada Peraturan Bupati No.42 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indikator Angka Populasi Bebas penyakit Tidak Menular adalah sebagai berikut:

- a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terlatih dalam melakukan Edukasi, Skrining, penegakan diagnosa, dan pemantauan penderita Hipertensi, Diabetes Melitus dan Kesehatan Jiwa
- b) Ketersediaan alat kesehatan (tensimeter, fotometer atau glukometer) serta BMHP (Strip tes gula darah dan obat Hipertensi, obat Diabetes Melitus serta obat antidepresan) sebagai penunjang pelayanan kesehatan Hipertensi, Diabetes Melitus dan Kesehatan Jiwa
- c) Ketersediaan Pedoman Pengendalian dan Media Promosi Kesehatan Hipertensi, Diabetes Melitus dan kesehatan Jiwa
- d) Pelaksanaan Skrining Kesehatan Jiwa di Puskesmas, Sekolah, dan Masyarakat salah satunya melalui CKG dengan sasaran Umum dan Anak Sekolah serta Ibu Hamil dan Ibu Nifas
- e) Pelaksanaan Skrining Hipertensi dan Diabetes Melitus aktif yang dilakukan melalui kegiatan Posbindu, Posyandu ILP, dan CKG.
- f) Kolaborasi lintas sektor seperti dengan instansi pemerintah lain, perusahaan, dan perguruan tinggi
- g) Tersedianya peraturan Kepala Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hambatan dalam pencapaian kinerja Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah sebagai berikut:

- a) Belum ada Aplikasi yang dapat memfasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi dan Diabetes Melitus per by Name secara lengkap dan stabil sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan.
- b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Hipertensi dan Diabetes Melitus

- c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan hasil skrining menderita Hipertensi atau Diabetes Melitus di Posbindu/Posyandu ILP/CKG Komunitas untuk datang ke Puskesmas/ Faskes lain untuk mendapatkan penegakan diagnosa dan pengobatan
- d) Masih kurangnya kesadaran penderita HT dan atau DM  $\geq 40$  tahun untuk melakukan pemeriksaan Deteksi Dini Stroke, Jantung, dan Gagal Ginjal Kronik
- e) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan jiwa secara berkala
- f) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan bila mengalami gejala gangguan kecemasan dan gejala gangguan depresi.
- g) Masih terjadi pelanggaran KTR di instansi pemerintah termasuk di Fasilitas Kesehatan
- h) Kurangnya peran aktif Satuan Tugas Penegak KTR

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagai berikut:

- a) Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi dan Diabetes Melitus secara manual
- b) Penemuan pasien dengan hasil skrining dengan HT dan DM pada Posbindu, Posyandu ILP, CKG Komunitas dimotivasi dan dipantau untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut ke Puskesmas
- c) Penyesuaian Target Sasaran Hipertensi pada tahun 2026 menggunakan Perhitungan Hipertensi Diagnosis berdasarkan hasil SKI 2023
- d) Melakukan Edukasi, Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan skrining HT dan DM dan pentingnya pemeriksaan Deteksi Dini Stroke, Jantung, dan Gagal Ginjal Kronik bagi penderita HT dan atau DM  $\geq 40$  tahun serta kepatuhan minum obat bagi penderita HT dan DM
- e) Melakukan Edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat termasuk Anak sekolah tentang pentingnya melakukan Skrining Kesehatan Jiwa dan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan bila mengalami gejala gangguan depresi dan gejala gangguan kecemasan
- f) Pelaksanaan Skrining kesehatan jiwa terintegrasi pada kegiatan CKG
- g) Melakukan Edukasi Sosialisasi tentang KTR di instansi Pemerintah termasuk di Fasilitas Kesehatan

- h) Melakukan *refreshing* serta evaluasi terhadap peran aktif Satuan Tugas Penegak KTR melalui pertemuan

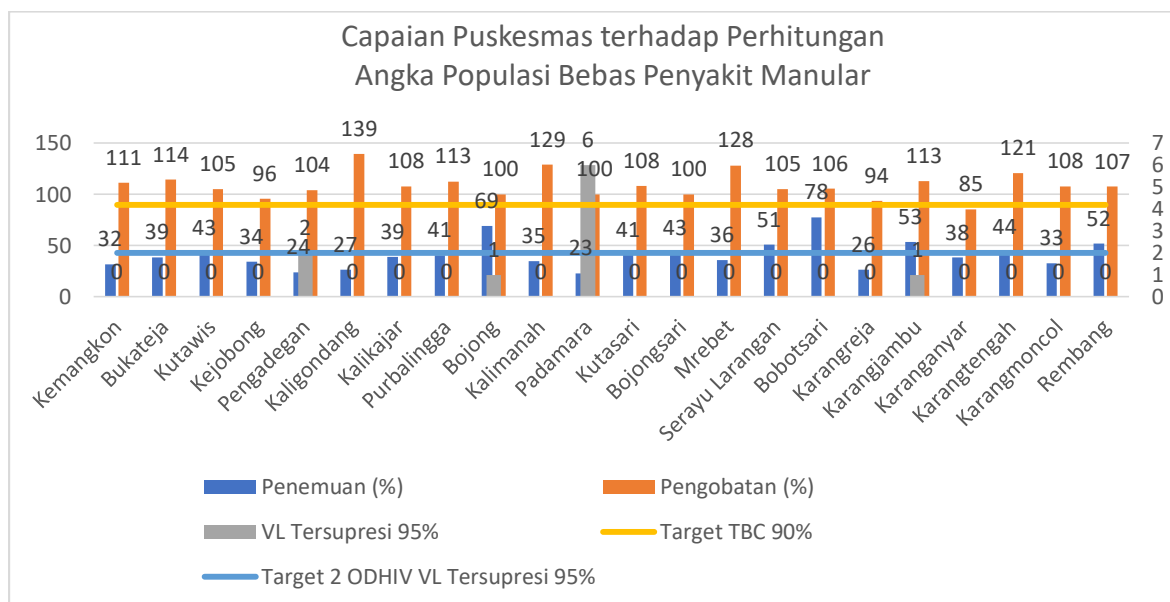
## 6) Angka Populasi Bebas Penyakit Menular

Definisi operasional Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) adalah Puskesmas yang memenuhi keberhasilan pengobatan TB >90% penemuan TB >90% dan minimal 2 dari ODHIV dalam pengobatan ARV yang dites viraload dengan hasil *Viraload* (VL) dengan hasil tersupresi 95%, eradikasi frambusia, eliminasi malaria.

Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 0,00%. Target perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 9,09% sehingga capaian kinerja sebesar 0,00% termasuk dalam kategori **Sangat Rendah**.

Berikut perhitungan Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagai berikut:

**Grafik 2. 7 Capaian Puskesmas Terhadap Angka Populasi Bebas Penyakit Menular Tahun 2025**



Keterangan:

Axis kiri untuk proram TBC dalam prosen. dan axis kanan untuk program HIV dalam angka absolut

Kabupaten Purbalingga telah mencapai eliminasi malaria tahun 2019 dan eradikasi frambusia tahun 2021, namun tidak ada Puskesmas yang memenuhi ketiga indikator perhitungan yakni pengobatan TB >90%, penemuan kasus TB >90% dan minimal 2 dari : ODHIV dalam pengobatan ARV yang dites viral load tersupresi 95%.

Hampir semua Puskesmas memenuhi target pengobatan lebih dari 90% kecuali Puskesmas Karanganyar yang hanya mencapai 85%. Untuk indikator penemuan TB tidak ada Puskesmas yang memenuhi target penemuan kasus TBC lebih dari 90%. Semua Puskesmas tidak memenuhi indikator penemuan kasus TBC lebih dari 90% dikarenakan belum semua indeks kasus dilakukan investigasi kontak dan kegiatan aktif *case finding* menggunakan *portable X-ray* belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan alat.

Hanya ada 2 puskesmas yang memenuhi minimal 2 ODHIV dengan VL tersupresi 95% yakni Puskesmas Pengadegan dan Puskesmas Padamara, namun kedua Puskesmas tersebut tidak memenuhi persyaratan pada indikator penemuan kasus TBC lebih dari 90%.

Faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator Angka Populasi Bebas Penyakit Menular adalah sebagai berikut:

- a) Masih banyaknya kasus yang belum terdeteksi. Angka kasus yang tercatat seringkali hanya sebagian kecil dari estimasi jumlah penderita yang sebenarnya di lapangan.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan TB dan tes HIV secara sukarela.
- c) Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB dan ODHIV
- d) Belum semua *indeks* kasus dilakukan investigasi kontak dan kegiatan aktif *case finding* menggunakan *portable X-ray* belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan alat.
- e) Rendahnya pemeriksaan VL di Purbalingga
- f) Ketersediaan logistik pemeriksaan VL dari Dinkesprov Jateng tersendat.
- g) Belum adanya laboratorium pemeriksa VL di Kabupaten Purbalingga
- h) Ketidapatuhan minum obat (putus berobat TB, tidak rutin ARV)
- i) Pergeseran Tren Penularan. Terdapat perubahan pola penularan yang perlu diwaspadai di Purbalingga. Kasus kini tidak hanya ditemukan pada kelompok risiko seperti pekerja seks atau pengguna narkoba suntik tetapi mulai banyak kasus LSL.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indikator Angka Populasi Bebas Penyakit Menular adalah sebagai berikut:

- a) Edukasi masyarakat terkait TBC dan HIV
- b) Masifnya proses penjarangan (*screening*) orang terduga Tuberkulosis an orang berisiko HIV di Fasyankes baik milik Pemerintah maupun swasta
- c) Melakukan kegiatan investigasi kontak,
- d) Mengadakan ACF (*active case finding*) di wilayah kerja Puskesmas Kaligondang, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas Serayu Larangan, Puskesmas Karangjambu, Puskesmas Bojong dan Puskesmas Karangtengah yang difasilitasi *X-Ray portable* oleh Dinkes Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan OP PARI Cabang Purbalingga dengan pembiayaan bersumber dari Dana BOP mendeteksi, melakukan skrining, dan mendiagnosis penyakit secara langsung di masyarakat atau kelompok terduga TBC
- e) Pembentukan 12 Desa/Kelurahan Siaga Peduli TBC- HIV
- f) Melaksanakan program inovasi GEMPUR TOSS TB (Gerakan Membara Purbalingga Temukan TBC Obati Sampai Sembuh) dengan sasaran 44 Desa / Kelurahan,
- g) Jejaring kerjasama dengan Yayasan MSI (Mentari Sehat Indonesia) Kabupaten Purbalingga dalam rangka penemuan suspek/kasus TBC dan pengobatan,
- h) Membentuk DPPM (Distric Public Private Mix) untuk mengkoordinasikan jejaring dengan fasyankes pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan,
- i) Membentuk KOPI TB (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia ) untuk penanggulangan TBC,
- j) Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk pelaksanaan aplikasi SITRUST (Sistem Informasi Treking Untuk Transportasi Spesimen) dalam pengiriman spesimen dahak
- k) Memantapkan koordinasi dan Jejaring dengan Fasyankes swasta seperti klinik dan DPM (Dokter Praktek Mandiri)
- l) Pengadaan *Cartridge Tes Cepat Molekuler* (TCM) digunakan terutama untuk mendeteksi penyakit Tuberkulosis (TBC).
- m) Pengadaan *Rapid test* HIV yang digunakan untuk skrining orang berisiko HIV
- n) Pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi program TB dan HIV

## 7) Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap jumlah penduduk merupakan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang tersedia terhadap jumlah penduduk. Capaian Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 2,48 per 1000 penduduk. Target perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 2,43 per 1000 penduduk sehingga capaian kinerja sebesar 102,25% termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Data absolut jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan) pada tahun 2025 sebanyak 2645 orang (Dokter sebanyak 450 orang, Perawat sebanyak 1424 orang dan bidan sebanyak 771 orang) sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 2665 orang (Dokter sebanyak 432 orang, Perawat sebanyak 1469 orang dan bidan sebanyak 764 orang). Penurunan ini disebabkan salah satunya karena ada salah satu rumah sakit yang merumahkan SDM-nya setelah kebijakan pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Hambatan pencapaian indikator Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

- a) Keterbatasan penambahan tenaga kesehatan yang tidak sejalan dengan penambahan jumlah penduduk
- b) Distribusi/pemerataan tenaga kesehatan diseluruh wilayah pelayanan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap jumlah penduduk adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan mutu dan kualitas perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan analisa beban kerja di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
- b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait rekomendasi izin praktik
- c) Pelaksanaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis tenaga medis dan tenaga kesehatan
- d) Optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan yang tersedia
- e) Perluasan wahana kerjasama pelaksanaan dokter *internship* untuk menambah tenaga dokter di Rumah Sakit dan Puskesmas

- f) Kerjasama institusi pendidikan kesehatan untuk menambah jumlah mahasiswa kesehatan yang melaksanakan praktik lapangan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

#### **8) Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar**

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang dimaksud dalam hal ini adalah Apotek, Lintas Kluster Ruang Farmasi di Puskesmas, Instalasi Farmasi di Rumah Sakit dan Industri Rumah Tangga. Industri Rumah Tangga yang dimaksud adalah industri yang baru dibuka pada tahun 2025.

Capaian persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan minuman yang memenuhi standar di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 85,91%. Target perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 88,31% sehingga capaian kinerja sebesar 97,28% termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 terdapat 122 Apotek, 9 Instalasi Farmasi di Rumah Sakit, 23 Lintas Kluster Ruang Farmasi di Puskesmas dan 144 Industri Rumah Tangga. Dari total 297 fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan minuman sebanyak 255 yang memenuhi standar terdiri dari 122 Apotek, 9 Instalasi Farmasi di Rumah Sakit, 22 Lintas Kluster Ruang Farmasi di Puskesmas dan 103 Industri Rumah Tangga.

Pada tahun 2025, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian serta sarana produksi makanan dan minuman. Secara umum, sebagian besar fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana makanan dan minuman telah memenuhi standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, capaian indikator belum sepenuhnya optimal karena beberapa Industri Rumah Tangga (IRT) belum semuanya memenuhi standar, Sebanyak 41 Industri Rumah Tangga tidak memenuhi standar dikarenakan dokumen persyaratan tidak terpenuhi dan rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Sebanyak 1 lintas cluster ruang farmasi di Puskesmas belum memenuhi standar karena baru beroperasi pada bulan Desember 2025.

Faktor penyebab kegagalan persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan minuman yang memenuhi standar adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi standar karena keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi pengelola fasilitas maupun petugas pengawas
- b) Tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha yang masih rendah terhadap standar yang ditetapkan
- c) Luasnya wilayah pengawasan dibandingkan dengan jumlah petugas yang tersedia.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja persentase fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan minuman yang memenuhi standar adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan bimbingan teknis CPPOB PIRT (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) bagi pelaku usaha
- b) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan rutin terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian dan makanan minuman
- c) Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- d) Optimalisasi pengawasan berbasis risiko agar pengawasan lebih efektif dan tepat sasaran.
- e) Meningkatkan koordinasi lintas sektor serta mendorong komitmen pelaku usaha dalam memenuhi standar pelayanan kefarmasian dan makanan minuman.
- f) Pemberian rekomendasi perbaikan dan pendampingan pasca inspeksi.
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan fasilitas pelayanan farmasidan PIRT
- h) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan SPPIRT dan Nomor PIRT

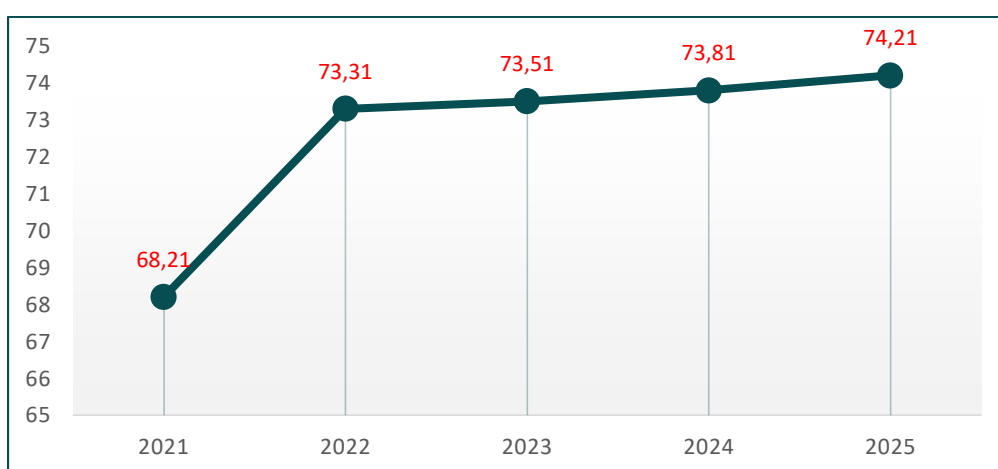
## **9) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Tujuan evaluasi adalah bentuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban atas hasil terhadap

penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebesar 74,21. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar 74 sehingga capaian kinerja sebesar 100,28% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

**Grafik 2. 8 Tren Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025**



Dari hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai 74,21 atau kategori “**BB**” (**Sangat Baik**). Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Meskipun kategori penilaian evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sangat baik namun masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/ sub komponen manajemen kinerja yang dinilai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a) Dukungan dan komitmen pimpinan OPD dalam penerapan manajemen kinerja
- b) Pelaporan kinerja disusun secara tepat waktu dan akuntabel

- c) Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja
- d) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a) Penyelarasan program dan kegiatan dengan target kinerja dan prioritas pembangunan daerah
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target-target kinerja secara berkala, serta mendokumentasikan secara memadai upaya dalam mencapai target-target kinerja organisasi
- c) Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP
- d) Seluruh pegawai sudah menyampaikan laporan capaian kerjanya (pada aplikasi e-kinerja) tepat waktu
- e) Menerapkan *reward and punishment* kepada pegawai

Terkait dengan capaian kinerja pelayanan DINKESPPKB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupaun terhadap IKK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga**

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan</b>								
<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>								
Usia Harapan Hidup (UHH)		74,23	74,61	74,99	74,19	74,48	74,61	74,99
Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		87,31	87,81	88,31	87,31	88,21	87,81	88,31
Persentase Penurunan Kasus Kematian Ibu		9,09	10,00	10,00	18,18	27,27	10,00	10,00
Angka Kematian Balita		15,3	14,8	14,5	15,76	12,71	14,8	14,5
Prevalensi Stunting		22,1	21,98	20,86	26	22,3	21,98	20,86
Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)		81,82	82,61	86,96	100	100	82,61	86,96

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)		9,09	13,04	17,39	NA	0,00	13,04	17,39
Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk		2,43	2,47	2,5	2,52	2,48	2,47	2,5
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar		88,31	94,21	94,55	69,52	85,91	94,21	94,55
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		74	74,31	74,41	73,81	74,21	74,31	74,41
<b>Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan</b>								
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Indikator Kinerja</b>								

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kunci Bidang Kesehatan</b>								
Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan		1	1	1	1	0,9	1	1
Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi		100	100	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	100	100	100	100	100	100
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100	100	100	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan		100	100	100	100	100	100	100

Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
pelayanan TBC sesuai standar								
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	14	12,1	11,9	11,7	11,34	12,12	11,9	11,7
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>								
<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>								
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		65,08-65,11	65,85-65,89	66,61-66,68	63,03	63,05	65,85	66,61
Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR		2,17-2,1	2,16-2,09	2,16-2,09	2,1	2,18	2,16	2,16
<b>Indikator Kinerja Kunci Bidang PPKB</b>								
TFR (Angka Kelahiran Total)		2,17-2,1	2,16-2,09	2,16-2,09	2,1	2,18	2,16	2,16
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		34,85	34,95	35,05				
Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		7,50	7,30	7,10	7,60	5,95	5,95	5,95

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. Isu-isu tersebut muncul sebagai hasil evaluasi capaian kinerja, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus kematian ibu dan balita
2. Masih ditemukannya balita stunting maupun wasting, serta anemia pada remaja putri dan ibu hamil

3. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular
4. Surveilans dan penemuan kasus aktif penyakit menular belum optimal
5. Kurangnya jumlah puskesmas terhadap rasio jumlah penduduk dan akses rumah sakit yang terpusat di wilayah perkotaan
6. Belum Optimalnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Kualitas pembangunan keluarga belum optimal
8. Kesertaan KB dan penggunaan MKJP belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan diatas apabila jika tidak ditangani akan menimbulkan beberapa dampak diantaranya: tidak tercapainya visi dan misi Kepala Daerah, tidak tercapainya target indikator RPJMD, Renstra, dan SPM bidang kesehatan., peningkatan angka kesakitan, meningkatnya beban pembiayaan kesehatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dimas yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Masih tingginya kasus penyakit menular dan meningkatnya penyakit Tidak Menular, serta permasalahan gizi (stunting, anemia) yang memerlukan intervensi komprehensif.
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama di wilayah tertentu, belum sepenuhnya optimal baik dari sisi kapasitas tenaga kesehatan, sarana prasarana, maupun mutu layanan.
3. Perubahan gaya hidup masyarakat
4. Sistem Informasi Kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi
5. Unmet need dan rendahnya penggunaan MKJP

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan pelayanan diantaranya adalah:

1. Dukungan kebijakan nasional dan daerah
2. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan kader

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Masih adanya kematian ibu dan balita
2. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
3. Masih tingginya prevalensi stunting
4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkeadilan

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah di Purbalingga khususnya di bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai leading sektor merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 8 program yaitu:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran Rp177.700.455.000/tahun. Karena keterbatasan dana, untuk mengatasi hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dengan prinsip skala prioritas, pemanfaatan dana yang efisien, dan kegiatan yang efektif yang mempunyai daya ungkit guna mencapai visi dan misi bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Purbalingga. Secara rinci review terhadap RKPD tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028

DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%	127.651.302.000	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%	127.675.450.000
		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%	
		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Kab. Purbalingga	100%		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang	Kab. Purbalingga	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%	
		Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh	Kab. Purbalingga	100%		Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh	Kab. Purbalingga	100%	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Kab. Purbalingga	100%	8.500.000	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Kab. Purbalingga	100%	8.500.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	3 dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	3 dokumen	5.000.000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 laporan	3.500.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 laporan	3.500.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Kab. Purbalingga	100%	125.890.825.000	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Kab. Purbalingga	100%	126.163.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1829 org/bln	125.730.899.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1829 org/bln	126.000.000.000
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	60 dokumen	67.378.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	60 dokumen	68.000.000
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	1 dokumen	92.548.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	1 dokumen	95.000.000
<b>1.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>4.800.000</b>	<b>Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 laporan	4.800.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 laporan	5.000.000
<b>1.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purbalingga	36 orang	4.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purbalingga	36 orang	4.000.000
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	2.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	2.000.000
<b>1.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>88.950.000</b>	<b>Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>88.950.000</b>
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	2.500.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	2.500.000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	54.450.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	54.450.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 dokumen	2.200.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 dokumen	2.200.000
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	12 laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	12 laporan	10.000.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	25 laporan	11.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	25 laporan	11.000.000
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	8.800.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	8.800.000
<b>1.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>92.772.000</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purbalingga	2 unit	92.772.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purbalingga	2 unit	55.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>743.074.000</b>	<b>Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>739.000.000</b>
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	1 laporan	800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	1 laporan	800.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	48 laporan	311.604.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	48 laporan	311.600.000
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 laporan	11.973.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 laporan	7.600.000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	6 laporan	418.697.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	6 laporan	419.000.000
<b>1.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>816.381.000</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>610.000.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purbalingga	43 unit	529.381.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purbalingga	43 unit	420.000.000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	47.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	73.000.000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	240.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	117.000.000
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Fasyankes yang menerapkan PPK BLUD</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>95,16%</b>		<b>Persentase Fasyankes yang menerapkan PPK BLUD</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>95,16%</b>	<b>-</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Purbalingga	25 unit		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Purbalingga	25 unit	-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Purbalingga		40.796.594.000	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kab. Purbalingga		42.835.897.000
		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna	Kab. Purbalingga	91,67%		Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna	Kab. Purbalingga	91,67%	
		Jumlah kematian ibu	Kab. Purbalingga	9 orang		Jumlah kematian ibu	Kab. Purbalingga	9 orang	
		Jumlah kematian balita	Kab. Purbalingga	155 orang		Jumlah kematian balita	Kab. Purbalingga	155 orang	
		Prevalensi wasting balita	Kab. Purbalingga	4,08%		Prevalensi wasting balita	Kab. Purbalingga	4,08%	
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Kab. Purbalingga	99,50%		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Kab. Purbalingga	99,50%	
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Kab. Purbalingga	60%		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Kab. Purbalingga	60%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	Kab. Purbalingga	93%		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	Kab. Purbalingga	93%	
		Insidensi HIV	Kab. Purbalingga	0,3 per 1000 penduduk		Insidensi HIV	Kab. Purbalingga	0,3 per 1000 penduduk	
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Kab. Purbalingga	24,27%		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Kab. Purbalingga	24,27%	
		Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan	Kab. Purbalingga	100%		Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan	Kab. Purbalingga	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Kab. Purbalingga	92%	5.557.967.000	Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Kab. Purbalingga	92%	5.721.300.000
		Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	88%		Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	88%	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Purbalingga	1 unit	2.000.000.000	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Purbalingga	1 unit	2.000.000.000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	479 unit	268.630.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	479 unit	420.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 paket	3.288.046.000	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 paket	3.300.000.000
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Purbalingga	24 paket	1.291.000	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Purbalingga	24 paket	1.300.000
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>35.059.131.000</b>	<b>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>36.812.097.000</b>
		<b>Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%	
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Kab. Purbalingga	100%		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Kab. Purbalingga	100%	
		Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Kab. Purbalingga	100%		Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Kab. Purbalingga	100%	
		Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kab. Purbalingga	82%		Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kab. Purbalingga	82%	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%		Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%	
		Persentase lanjut usia yang mandiri	Kab. Purbalingga	96%		Persentase lanjut usia yang mandiri	Kab. Purbalingga	96%	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%	
		Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%		Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%	
		Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%		Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Depresi yang mendapat layanan	Kab. Purbalingga	4,30%		Persentase Depresi yang mendapat layanan	Kab. Purbalingga	4,30%	
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Kab. Purbalingga	22%		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Kab. Purbalingga	22%	
		Prevalensi Obesitas	Kab. Purbalingga			Prevalensi Obesitas	Kab. Purbalingga		
		Persentase UKK yang dibina	Kab. Purbalingga	100%		Persentase UKK yang dibina	Kab. Purbalingga	100%	
		Cakupan penemuan kasus TB	Kab. Purbalingga	97%		Cakupan penemuan kasus TB	Kab. Purbalingga	97%	
		Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%		Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%	
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Kab. Purbalingga	58%		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Kab. Purbalingga	58%	
		Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam	Kab. Purbalingga	100%		Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam	Kab. Purbalingga	100%	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Annual Parasite Incidence (API) Malaria	Kab. Purbalingga	0,01 per 1000 penduduk		Annual Parasite Incidence (API) Malaria	Kab. Purbalingga	0,01 per 1000 penduduk	
		Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	100%		Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	100%	
		Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Kab. Purbalingga	100%		Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Kab. Purbalingga	100%	
		Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina	Kab. Purbalingga	100%		Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina	Kab. Purbalingga	100%	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11365 orang	308.582.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11365 orang	324.012.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10912 orang	50.800.000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10912 orang	53.340.000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10903 orang	1.640.443.000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10903 orang	1.722.466.000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	52152 orang	11.665.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	52152 orang	12.249.000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	140773 orang	36.035.000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	140773 orang	37.837.000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	673046 orang	12.890.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	673046 orang	13.535.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	132801 orang	5.820.000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	132801 orang	6.111.000
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	34998 orang	5.950.000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	34998 orang	6.248.000
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11666 orang	1.600.000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11666 orang	1.680.000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2671 orang	3.766.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2671 orang	3.955.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	13437 orang	2.278.965.000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	13437 orang	2.392.914.000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14925 orang	109.540.000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14925 orang	115.017.000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 dokumen	30.160.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 dokumen	31.668.000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 dokumen	1.837.916.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 dokumen	1.929.812.000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	6 dokumen	141.990.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	6 dokumen	149.090.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	4 dokumen	3.680.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	4 dokumen	3.864.000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	12 dokumen	97.735.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	12 dokumen	102.622.000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	27 orang	4.100.000	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	27 orang	4.305.000
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 dokumen	26.590.674.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 dokumen	27.920.208.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Purbalingga	4669 paket	670.600.000	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Purbalingga	4669 paket	704.130.000
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 dokumen	4.608.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 dokumen	4.839.000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 dokumen	707.200.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 dokumen	742.560.000
1.02.02.2.02.0034	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	8 dokumen	4.200.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	8 dokumen	4.410.000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	12 laporan	3.830.000	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	12 laporan	4.022.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	1 unit	253.930.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	1 unit	266.627.000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Purbalingga	1749 orang	32.801.000	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Purbalingga	1749 orang	34.442.000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	3 dokumen	191.651.000	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	3 dokumen	201.234.000
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Purbalingga	1 dokumen	18.000.000	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Purbalingga	1 dokumen	18.900.000
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	Kab. Purbalingga	1 laporan	26.315.000	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	Kab. Purbalingga	1 laporan	27.631.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	1586 orang	7.045.000	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	1586 orang	7.398.000
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Kab. Purbalingga		321.246.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Kab. Purbalingga		337.309.000
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Kab. Purbalingga		168.359.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Kab. Purbalingga		176.777.000
1.02.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>70%</b>	<b>45.210.000</b>	<b>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>70%</b>	<b>168.000.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Infomasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	1 dokumen	45.210.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	1 dokumen	168.000.000
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>134.286.000</b>	<b>Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>134.500.000</b>
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	51 unit	3.750.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	51 unit	4.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	56 unit	5.000.000	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	56 unit	5.000.000
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	60 unit	125.536.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	60 unit	125.500.000
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>89,33%</b>	<b>1.034.569.000</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>89,33%</b>	<b>1.034.659.000</b>
		<b>Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	98%	5.260.000			98%	5.350.000
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	24 dokumen	3.250.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	24 dokumen	3.250.000
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	13 dokumen	2.010.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	13 dokumen	2.100.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Kab. Purbalingga	100%	200.179.000	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Kab. Purbalingga	100%	200.179.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	2098 orang	6.795.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	2098 orang	6.795.000
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	5 dokumen	193.384.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	5 dokumen	193.384.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	Kab. Purbalingga	100%	829.130.000	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	Kab. Purbalingga	100%	829.130.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	214 orang	829.130.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	214 orang	829.130.000
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>361.531.000</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>361.531.000</b>
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Kab. Purbalingga	61%		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Kab. Purbalingga	61%	-
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Kab. Purbalingga	100%	60.254.000	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Kab. Purbalingga	100%	60.254.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	80 dokumen	60.254.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	80 dokumen	60.254.000
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>35%</b>	<b>133.540.000</b>	<b>Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>35%</b>	<b>133.540.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	55 dokumen	133.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	55 dokumen	133.540.000
1.02.04.2.06	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>167.737.000</b>	<b>Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>167.737.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	124 unit	167.737.000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	124 unit	167.737.000
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>91%</b>	<b>54.947.000</b>	<b>Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>91%</b>	<b>54.947.000</b>
1.02.05.2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>25.661.000</b>	<b>Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>25.661.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 dokumen	25.661.000	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 dokumen	25.661.000
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Sehat</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>95,84%</b>	<b>26.986.000</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Sehat</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>95,84%</b>	<b>26.986.000</b>
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	3 dokumen	26.986.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	3 dokumen	26.986.000
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>89,00%</b>	<b>2.300.000</b>	<b>Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>89,00%</b>	<b>2.300.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	6 dokumen	2.300.000	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	6 dokumen	2.300.000
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Median Usia Kawin Pertama (MKUP)</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>21%</b>	<b>234.900.000</b>	<b>Median Usia Kawin Pertama (MKUP)</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>21%</b>	<b>234.900.000</b>
<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase terpenuhinya Program Bangga Kencana</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>9.920.000</b>	<b>Persentase terpenuhinya Program Bangga Kencana</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>9.920.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	3.957.000	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	3.957.000
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	2.400.000	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	2.400.000
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	4 kegiatan	3.563.000	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	4 kegiatan	3.563.000
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>224.980.000</b>	<b>Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>100%</b>	<b>224.980.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	143.400.000	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	143.400.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Kab. Purbalingga	12 dokumen	74.400.000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Kab. Purbalingga	12 dokumen	74.400.000
2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	Kab. Purbalingga	2 dokumen	7.180.000	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	Kab. Purbalingga	2 dokumen	7.180.000
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>1,40%</b>	<b>1.943.254.000</b>	<b>Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>1,40%</b>	<b>1.943.254.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Kab. Purbalingga	19,20%	855.288.000	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Kab. Purbalingga	19,20%	855.288.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	799.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	799.200.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Purbalingga	3 dokumen	16.088.000	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Purbalingga	3 dokumen	16.088.000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Kab. Purbalingga	1 organisasi	40.000.000	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Kab. Purbalingga	1 organisasi	40.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB	Kab. Purbalingga	100%	179.250.000	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB	Kab. Purbalingga	100%	179.250.000
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Purbalingga	1813 orang	179.250.000	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Purbalingga	1813 orang	179.250.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Kab. Purbalingga	90,20%	848.566.000	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Kab. Purbalingga	90,20%	848.566.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Kab. Purbalingga	12 laporan	86.400.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Kab. Purbalingga	12 laporan	86.400.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Kab. Purbalingga	15000 orang	758.846.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Kab. Purbalingga	15000 orang	758.846.000
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	3.320.000	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	3.320.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Proporsi Kampung KB Mandiri	Kab. Purbalingga	0,84%	60.150.000	Proporsi Kampung KB Mandiri	Kab. Purbalingga	0,84%	60.150.000
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Purbalingga	7 unit	52.500.000	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Purbalingga	7 unit	52.500.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Purbalingga	92 kampung	7.650.000	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Purbalingga	92 kampung	7.650.000
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>98%</b>	<b>5.109.743.000</b>	<b>Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>98%</b>	<b>5.109.743.000</b>
		Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan	Kab. Purbalingga	71%		Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan	Kab. Purbalingga	71%	-
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kab. Purbalingga	83,82%	10.055.000	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kab. Purbalingga	83,82%	10.055.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	4.760.000	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	4.760.000
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	5.295.000	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	5.295.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Kab. Purbalingga	100%	5.099.688.000	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Kab. Purbalingga	100%	5.099.688.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Kab. Purbalingga	769 laporan	5.075.400.000	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Kab. Purbalingga	769 laporan	5.075.400.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	7.538.000	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	7.538.000
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	16.750.000	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	16.750.000

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Setiap usulan pembangunan yang masuk akan ditelaah kesesuaiannya dengan program prioritas pembangunan daerah. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa.

Masukan dari legislatif melalui pokok-pokok pikiran anggota legislatif serta usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Purbalingga lainnya akan menjadi acuan dasar bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga untuk membuat usulan program/kegiatan. Usulan masuk yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah akan diprioritaskan untuk masuk dalam program/kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.

<b>Usulan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alamat Lokasi</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Gedung yang sudah ada kurang memadai	Desa Pasunggingan Rt 18 Rw 08, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Pasunggingan
Bantuan stimulan Jamban	Masih ada masyarakat yang belum memiliki jamban	Desa Pasunggingan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Pasunggingan
Pengadaan alat kesehatan	Belum terpenuhi alat kesehatan	Tegalpingen , Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Tegalpingen
Bantuan stimulan Jamban	Masih ada warga miskin yang belum punya jamban	Desa Bedagas, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Bedagas
Bantuan stimulan Jamban	Kurangnya fasilitas jamban bagu masyarakat	Dusun 1 S/D 5 Desa Larangan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Larangan
Pelatihan kader kesehatan	Kurangnya pemahaman dan tupoksi Kades Kesehatan Desa	Desa Larangan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Larangan
Bantuan stimulan Jamban	Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki jamban sehat yang memenuhi standar kesehatan. Sebagian warga masih menggunakan jamban tidak layak atau melakukan buang air besar sembarangan, yang berpotensi mencemari lingkungan	Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Kramat

<b>Usulan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alamat Lokasi</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	dan sumber air di sekitarnya.				
Pengadaan alat kesehatan	Kurangnya sarana prasarana Kesehatan Desa	Desa Larangan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Larangan
Pengadaan ambulans desa	Belum tersedianya ambulans desa	Desa Larangan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Larangan
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Sudah roboh rata dengan tanah	Rt 01 Rw 05 Desa Tangkisan Kec. Mrebet Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Tangkisan
Pengadaan ambulans desa	Tidak adanya mobil ambulans Desa	Desa Lambur, Kec Mrebet, Kab Purbalingga, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Lambur
Bantuan stimulan Jamban	Masih ada banyak warga yang belum memiliki jamban sehat	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Tangkisan
Pengadaan ambulans desa	Belum adanya Ambulan Desa	Desa Campakoah, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Campakoah
Bantuan stimulan Jamban	Masih banyak rumah yang belum mempunyai jamban layak dikarenakan keterbatasan lahan dan biaya	Desa Galuh, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bojongsari	Galuh
Bantuan stimulan Jamban	Masih ada rumah warga yang belum punya jamban	Binangun, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Binangun
Pengadaan ambulans desa	Banyak warga masyarakat kesulitan mengakses ke Puskesmas dan	Desa Grantung, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Grantung

<b>Usulan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alamat Lokasi</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	Rumah Sakit jika akan berobat dan mengalami kegawat daruratan				
Bantuan stimulan Jamban	1. Masih Banyak Rumah yang tidak memiliki Septictank 2. Untuk menanggulangi Stunting	Dusun I, Dusun II Dan Dusun III, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bojongsari	Beji
Pelatihan kader kesehatan	Pelatihan ASI Eksklusif	Desa Onje Rt 03 Rw 01 Dusun 3, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Onje
Pelatihan kader kesehatan	Pelatihan Pembuatan PMT Kader Kesehatan	Desa Onje Rt 01 Rw 05 Dusun 3, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Onje
Pengadaan ambulans desa	Terbatasnya Anggaran Desa	Pandansari , Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kejobong	Pandansari
Bantuan stimulan Jamban	Pemenuhan jambanisasi bagi warga kurang mampu	Desa Kedungbenda, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kemangkon	Kedungbenda
Pengadaan ambulans desa	Masyarakat membutuhkan kendaraan	Dusun I Rt 001 Rw 001, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Rajawana
Pelatihan kader kesehatan	Peningkatan kualitas Pelayanan Kader kesehatan di tingkat Masyarakat	Desa Rajawana, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Rajawana
Pengadaan ambulans desa	Belum tersedianya mobil Ambulan Desa	Nangkod, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kejobong	Nangkod
Bantuan stimulan Jamban	Masih banyak warga belum memiliki jamban sendiri	Desa Karangjengkol, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kutasari	Karangjengkol
Pelatihan kader kesehatan	Perlu adanya peningkatan sdm	Desa Penaruban, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Penaruban

<b>Usulan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alamat Lokasi</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Bantuan stimulan Jamban	Masih banyak rumah yang tidak memiliki septictank	Desa Purbasari, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangjambu	Purbasari
Pelatihan kader kesehatan	Perlunya pembinaan untuk kader kader kesehatan	Desa Kalimanah Wetan Dusun 1 Dan Dusun 2, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kalimanah	Kalimanah Wetan
Pengadaan ambulans desa	Belum adanya kendaraan mobil siaga didesa karangpetir	Desa Karangpetir, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kalimanah	Karangpetir
Pengadaan ambulans desa	Belum mempunyai Sarana dan Prasarana Mobil Siaga Desa	Desa Jingsang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangjambu	Jingsang
Pelatihan kader kesehatan	Pelatihan kader kesehatan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam bidang kesehatan. Melalui pelatihan ini, kader memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar terkait pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pemantauan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kader	Desa Sanguwatang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangjambu	Sanguwatang

<b>Usulan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alamat Lokasi</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	kesehatan mampu menjadi perpanjangan tangan tenaga medis di tingkat desa, meningkatkan kesadaran masyarakat				
Pengadaan ambulans desa	Sampai saat ini belum memiliki fasilitas ambulans desa sebagai sarana transportasi kesehatan darurat. Apabila terjadi keadaan gawat darurat (kecelakaan, ibu melahirkan, sakit mendadak), warga harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa mobil, sehingga memperlambat penanganan medis. Belum tersedianya sistem transportasi kesehatan desa yang siaga 24 jam untuk kebutuhan masyarakat.	Desa Sanguwatang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangjambu	Sanguwatang
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Relokasi Puskesmas Kutawis, Bangunan Puskesmas kutawis saat ini berada di tanah kas desa, Kondisi bangunan dan lokasi tidak representatif	Rt 001 Rw 001, Dusun 1, Desa Kutawis, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Kutawis

<b>Usulan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alamat Lokasi</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Bantuan stimulan Jamban	Masih ada rumah tangga yang jambannya numpang dengan keluarga lain	Desa Cipawon, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Cipawon
Pelatihan kader kesehatan	Kader butuh belajar banyak tentang ilmu kesehatan dan public speaking	Desa Cipawon, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Cipawon
Bantuan stimulan Jamban	Siswa kurang mampu	Dusun 1, 2,3,4,5, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Kembangan
Pelatihan kader kesehatan	Penambahan pemahaman tentang kesehatan	Dusun 1, 2,3,4,5, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Kembangan
Bantuan stimulan Jamban	Masih Banyak Rumah Yang Belu Memakai Jamban Sehingga Sangat menggagu Kesehatan Masyarakat	Karanggedang Dusun 1 - Dusun 4 , Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Karanggedang
Bantuan stimulan Jamban	Masih banyak rumah belum memiliki jamban	Desa Majasari, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Majasari
Pengadaan ambulans desa	Desa Kebutuh belum memiliki mobil untuk Ambulans Desa maupun untuk operasional, maka sangat membutuhkan untuk mengantarkan warga menuju rumah sakit yang cukup jauh	Desa Kebutuh, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bukateja	Kebutuh
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Gedung Puskesmas Pembantu Di Desa Timbang Kondisinya Rusak	Desa Timbang Rt 03 Rw 01 Dusun 1 Desa Timbang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kejobong	Timbang

<b>Usulan</b>	<b>Masalah</b>	<b>Alamat Lokasi</b>	<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Pelatihan kader kesehatan	Masih belum adas setandarisasi untuk pelatihan kader kesehatan../maka guna meningkatkan kualitas kader kesehatan sangat perlu untuk diadakannya pelatihan tersebut	Kajongan Dusun 3 Rt 01 Rw 06, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bojongsari	Kajongan
Bantuan stimulan Jamban	Masih banyak yang BAB sembarangan	Desa Candiwulan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kutasari	Candiwulan
Bantuan stimulan Jamban	Masih Banyaknya Sebagian warga yang BAB di sungai	Dusun 1 Rw 06, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Karangduren
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Sempitnya lahan puskesmas Karanganyar	Desa Karanganyar, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karanganyar	Karanganyar
Pelatihan kader kesehatan	Penanggulangan Eliminasi TBC dan cek Kesehatan Gratis satu kecamatan	Uptd Puskesmas Rembang Desa Losari Kecamatan Rembang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Rembang	Losari
Bantuan stimulan Jamban	Masih terdapat keluarga (KK) yang belum memiliki jamban	Desa Kedungbenda, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kemangkon	Kedungbenda

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan dan Sasaran Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RPJMN 2025-2029 telah mengidentifikasi dan memetakan peran signifikan khususnya di bidang kesehatan dalam mengkoordinasikan berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, yang hamper seluruhnya berada di bawah Proritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Prioritas Nasional 4 dan berkaitan dengan kesehatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak termasuk anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat.
2. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan hidup sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan.
3. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat.
4. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi/pendekatan khusus/modifikasi pelayanan kesehatan bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, penguatan

jejaring layanan kesehatan primer berbasis tatanan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Induk Bidang Kesehatan, arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk 5 tahun kedepan yaitu *“Menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”*.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut memastikan tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Pada tahun 2025-2029, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melanjutkan transformasi kesehatan, mencakup:

1. **Transformasi Layanan Primer** bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat di setiap siklus hidup melalui peningkatan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan primer.
2. Transformasi Layanan Lanjutan bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan secara di Indonesia
3. Transformasi Ketahanan Kesehatan bertujuan untuk memperkuat kapasitas ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi ancaman kesehatan global maupun nasional.
4. Transformasi Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang berfokus pada peningkatan akses layanan yang adil dan terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
5. Transformasi SDM Kesehatan bertujuan untuk menjamin kecukupan dan pemerataan SDM Kesehatan yang kompeten secara proposional terhadap jumlah penduduk, termasuk di kawasan DTPK.
6. Transformasi Teknologi Kesehatan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi.

Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terdapat 4 Prioritas Nasional yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Kemendukbangga/BKKBN, yaitu: Prioritas Nasional 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam).

Kemendukbangga/BKKBN mendukung Prioritas Nasional 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” khususnya pada Program Prioritas Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi pada Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Pada Prioritas Nasional (PN) 4: “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Kemendukbangga/BKKBN secara langsung berkontribusi terhadap 4 program prioritas sebagai berikut:

1. Program Prioritas Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pada kegiatan prioritas:
  - a. Penurunan Kematian Ibu dan Anak;
  - b. Pencegahan dan Penurunan Stunting; dan
  - c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro.
2. Program Prioritas Peningkatan Ketangguhan Keluarga, pada kegiatan prioritas:
  - a. Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak;
  - b. Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga; dan
  - c. Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan.
3. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda, pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko.
4. Program Prioritas Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, pada Kegiatan Prioritas Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Pada Prioritas Nasional (PN) 6 dalam “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, Kemendukbangga/BKKBN berkontribusi pada 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Pada Program Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*); dan
2. Program Prioritas Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan pada Kegiatan Prioritas Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di atas, maka Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan kerangka arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu “*Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas*”.

Secara detail, arah kebijakan dan strategi meliputi:

1. Bidang Pengendalian Penduduk  
Meningkatkan sinergi kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif dalam kerangka demografi (fertilitas, mortalitas, mobilitas, struktur penduduk, distribusi, dan kepadatan penduduk) dalam rangka mendukung upaya kapitalisasi bonus Demografi.
2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga  
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas
3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  
Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan inklusif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran sesuai dengan siklus hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga menyelaraskan sasaran, indikator, dan program kegiatan daerah dengan lima fokus prioritas utama, yaitu: (1) penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, (2) percepatan penurunan kasus kematian ibu, balita dan stunting, (3) pengendalian penyakit menular dan tidak menular, (4) peningkatan kesertaan KB dan pengendalian penduduk, serta (5) pembangunan keluarga berkualitas.

Penyelarasan ini menjadi penting guna memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah mendukung pencapaian target RPJMN dan Renstra

Tahun 2025–2029, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas keluarga secara berkelanjutan di daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan pembangunan Purbalingga Tahun 2027 dilaksanakan dengan tema **“Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Priwisata Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”** dengan menitikberatkan pada beberapa sasaran 1) Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif, 2) Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, 3) Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas, 4) Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul.

Mengacu pada sasaran tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga yang secara langsung berkaitan dengan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni **“Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul”**, maka dalam upaya menjawab isu dan permasalahan khususnya dalam urusan pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah **“Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas”** dengan indikator Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).

Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan
2. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2027**

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2027
1	2	3	4	5
Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,99
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,61
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	88,31
		Persentase Penurunan Kasus Kematian Ibu	Persen	25
		Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	12,42
		Prevalensi Stunting	Persen	20,86
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persen	100
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Persen	17,39
		Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000 penduduk	2,5
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar	Persen	94,55
		Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka	74,41

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam pencapaian tujuan startegis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 8 program, 29 kegiatan dan 90 sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2027**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1	2	3
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	
1.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b> <b>Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan</b> <b>Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang</b> <b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan</b> <b>Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh</b>
1.02.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu</i>
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu</i>
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.02.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan</i>

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.02.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan</i>
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.02.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum</i>
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.02.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja</i>
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1.02.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang</i>
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1.02.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD</i>

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1.02.01.2.10	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	<i>Persentase Fasyankes yang menerapkan PPK BLUD</i>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
<b>1.02.02</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar</b>
		<b>Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna</b>
		<b>Jumlah kematian ibu</b>
		<b>Jumlah kematian balita</b>
		<b>Prevalensi wasting balita</b>
		<b>Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional</b>
		<b>Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis</b>
		<b>Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)</b>
		<b>Insidensi HIV</b>
		<b>Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat</b>
<b>Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan</b>		
1.02.02.2.01	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar</i>
		<i>Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar</i>
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.02	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar</i> <i>Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar</i> <i>Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar</i> <i>Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap</i> <i>Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya</i> <i>Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</i> <i>Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> <i>Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar</i> <i>Persentase lanjut usia yang mandiri</i> <i>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> <i>Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> <i>Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar</i> <i>Persentase Depresi yang mendapat layanan</i> <i>Persentase merokok penduduk 10-21 tahun</i> <i>Prevalensi Obesitas</i> <i>Persentase UKK yang dibina</i>

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<i>Cakupan penemuan kasus TB</i>
		<i>Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar</i>
		<i>Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat</i>
		<i>Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam</i>
		<i>Annual Parasite Incidence (API) Malaria</i>
		<i>Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>
		<i>Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi</i>
		<i>Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina</i>
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja
1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
1.02.02.2.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional</i>
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.02.2.04	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin</i>
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
<b>1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar</b>
		<b>Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar</b>
1.02.03.2.01	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan</i>
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.02.03.2.02	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</i>
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan</i>
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
<b>1.02.04</b>	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	<b>Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar</b>
		<b>Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan</b>
1.02.04.2.01	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	<i>Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan</i>
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.03	<i>Penerbitan Sertifikat produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	<i>Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar</i>
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.02.04.2.06	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	<i>Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu</i>
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
<b>1.02.05</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup</b>
1.02.05.2.01	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif</i>
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02	<i>Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Rumah Tangga Sehat</i>
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.03	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi</i>
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
<b>2.14.02</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Median Usia Kawin Pertama (MKUP)</b>
2.14.02.2.01	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>Persentase terpenuhinya Program Bangga Kencana</i>

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)
2.14.02.2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan</i>
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)
2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)
<b>2.14.03</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan</b>
2.14.03.2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun</i>
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2.14.03.2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB</i>
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.14.03.2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern</i>
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)
2.14.03.2.04	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Proporsi Kampung KB Mandiri</i>
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
<b>2.14.04</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif</b>
		<b>Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan</b>
2.14.04.2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)</i>

<b>Kode</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)
2.14.04.2.02	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga</i>
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pendanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Alokasi anggaran diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah dan target pembangunan daerah. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.2.14.0.00.01.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				177.700.455.000				177.961.096.000	DINKES PPKB
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				170.405.358.000				170.673.199.000	DINKES PPKB
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.405.358.000				170.673.199.000	DINKES PPKB
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%	127.415.512.000	DAU		100%	127.675.450.000	DINKES PPKB
		Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan		100%				100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		100%				100%		
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan		100%				100%		
		Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh		100%				100%		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Kab. Purbalingga	100%	8.500.000	DAU		100%	8.500.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	2 dokumen	5.000.000	DAU	Renja, DPA	2 dokumen	5.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 laporan	3.500.000	DAU	LKJiP, LKPJ, SAKIP, Laporan capaian Renja, Laporan Evaluasi RTP	5 laporan	3.500.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Kab. Purbalingga	100%	125.910.825.000	DAU		100%	126.163.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1829 org/bln	125.750.899.000	DAU		1829 org/bln	126.000.000.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	60 dokumen	67.378.000	DAU	Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	60 dokumen	68.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	1 dokumen	92.548.000	DAU	Honor PPTK, PPKom/ Bendahara pembantu, Penyusunan LKD	1 dokumen	95.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga	100%	8.100.000	DAU		100%	5.000.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 laporan	8.100.000		Honorarium Pejabat Pengadaan, Pengurus Barang dan pengurus barang pembantu	1 laporan	5.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Kab. Purbalingga	100%	6.000.000	DAU		100%	6.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purbalingga	36 orang	4.000.000	DAU	Uang harian perjalanan dinas diklat	36 orang	4.000.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	2.000.000	DAU	Fasilitasi ASN untuk mengikuti Bimtek perundang-undangan	30 orang	2.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Kab. Purbalingga	100%	85.700.000	DAU		100%	88.950.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	2.500.000	DAU		1 paket	2.500.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	54.450.000	DAU		1 paket	54.450.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 dokumen	2.200.000	DAU		12 dokumen	2.200.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	12 laporan	10.000.000	DAU		12 laporan	10.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	25 laporan	11.000.000	DAU		25 laporan	11.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	5.550.000	DAU	Fasilitasi untuk operator SIMDA, Operator SIMASET	9 dokumen	8.800.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Kab. Purbalingga	100%	54.645.000	DAU		100%	55.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purbalingga	3 unit	54.645.000	DAU		3 unit	55.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Kab. Purbalingga	100%	738.641.000	DAU		100%	739.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	1 laporan	800.000	DAU		1 laporan	800.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	48 laporan	311.604.000	DAU		48 laporan	311.600.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 laporan	7.540.000	DAU		12 laporan	7.600.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	6 laporan	418.697.000	DAU		6 laporan	419.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Kab. Purbalingga	100%	603.101.000			100%	610.000.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purbalingga	43 unit	414.421.000			43 unit	420.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	72.000.000			40 unit	73.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	116.680.000			2 unit	117.000.000	DINKES PPKB
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Fasyankes yang menerapkan PPK BLUD	Kab. Purbalingga	95,16%				95,16%		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Purbalingga	25 unit				25 unit		DINKES PPKB
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>83,10%</b>	<b>41.538.799.000</b>			<b>83,10%</b>	<b>41.546.612.000</b>	DINKES PPKB
		<b>Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>91,67%</b>				<b>91,67%</b>		DINKES PPKB
		<b>Jumlah kematian ibu</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>6 orang</b>				<b>6 orang</b>		DINKES PPKB
		<b>Jumlah kematian balita</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>125 orang</b>				<b>125 orang</b>		DINKES PPKB
		<b>Prevalensi wasting balita</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>4,09%</b>				<b>4,09%</b>		DINKES PPKB
		<b>Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>99,50%</b>				<b>99,50%</b>		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Kab. Purbalingga	60%				60%		DINKES PPKB
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	Kab. Purbalingga	93%				93%		DINKES PPKB
		Insidensi HIV	Kab. Purbalingga	0,3 per 1000 penduduk				0,3 per 1000 penduduk		DINKES PPKB
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Kab. Purbalingga	24,27%				24,27%		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase kegiatan surveil kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	Kab. Purbalingga	92%	5.714.107.000			92%	5.721.300.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	88%				88%		DINKES PPKB
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Purbalingga	1 unit	2.000.000.000	DAU	Puskesmas Padamara	1 unit	2.000.000.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	479 unit	418.630.000	DAK NF BOK		479 unit	420.000.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 paket	3.294.186.000	DBHCHT, DAK NF-BOK, Pendapatan bagi hasil pajak rokok		2 paket	3.300.000.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Purbalingga	24 paket	1.291.000	DAU		24 paket	1.300.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%	35.522.812.000			100%	35.522.812.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kab. Purbalingga	82%				82%		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Persentase lanjut usia yang mandiri	Kab. Purbalingga	97%				97%		DINKES PPKB
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Persentase Depresi yang mendapat layanan	Kab. Purbalingga	4,30%				4,30%		DINKES PPKB
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Kab. Purbalingga	22%				22%		DINKES PPKB
		Prevalensi Obesitas	Kab. Purbalingga	9,50%				9,50%		DINKES PPKB
		Persentase UKK yang dibina	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Cakupan penemuan kasus TB	Kab. Purbalingga	97%				97%		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Kab. Purbalingga	58%				58%		DINKES PPKB
		Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Annual Parasite Incidence (API) Malaria	Kab. Purbalingga	0,01 per 1000 penduduk				0,01 per 1000 penduduk		DINKES PPKB
		Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
		Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11365 orang	308.582.000	DAU, DAK NF BOK		11365 orang	324.012.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10912 orang	50.800.000	DAU, DAK NF BOK		10912 orang	53.340.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10903 orang	1.640.443.000	DAU, DAK NF BOK		10903 orang	1.722.466.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	52152 orang	11.665.000	DAU		52152 orang	12.249.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	140773 orang	36.035.000	DAU		140773 orang	37.837.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	673046 orang	13.602.000	DAU		673046 orang	14.283.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	132801 orang	5.820.000	DAU		132801 orang	6.111.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	34998 orang	18.390.000	DAU		34998 orang	19.310.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11666 orang	14.040.000	DAU		11666 orang	14.742.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2671 orang	7.490.000	DAU		2671 orang	7.865.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	13437 orang	2.278.965.000	DAU, DAK NF BOK		13437 orang	2.392.914.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14925 orang	112.040.000	Pendapatan Hasil Pajak Rokok		14925 orang	117.642.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 dokumen	30.160.000	DAU		4 dokumen	31.668.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 dokumen	1.837.916.000	DAK NF BOK, Pendapatan Hasil Pajak Rokok		4 dokumen	1.929.812.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	6 dokumen	141.990.000	DAU, DAK NF BOK		6 dokumen	149.090.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0019		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	4 dokumen	3.680.000	DAU		4 dokumen	3.864.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	12 dokumen	97.735.000	DAU, DAK NF BOK		12 dokumen	102.622.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	27 orang	5.000.000	DAU		27 orang	5.250.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 dokumen	26.590.674.000	DBHCHT, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		12 dokumen	27.920.208.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Purbalingga	4669 paket	670.600.000	DAK NF BOK		4669 paket	704.130.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 dokumen	62.608.000	DAU		9 dokumen	65.739.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 dokumen	557.200.000	Pendapatan Hasil Pajak Rokok		23 dokumen	585.060.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0034	Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	8 dokumen	4.200.000				4.410.000	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	12 laporan	3.830.000	DAU		12 laporan	4.022.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0038		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	1 unit	253.930.000	Pendapatan Hasil Pajak Rokok		1 unit	266.627.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Purbalingga	1749 orang	32.801.000	DAU, DAK NF BOK		1749 orang	34.442.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	3 dokumen	191.651.000	DAK NF BOK		3 dokumen	201.234.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0050		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Purbalingga	1 dokumen	18.000.000	DAU		1 dokumen	18.900.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0054		Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	Kab. Purbalingga	1 laporan	26.315.000	DAU		1 laporan	27.631.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0055		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	1586 orang	7.045.000	DAU		1586 orang	7.398.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.02.0056		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Kab. Purbalingga		321.246.000	DAK NF BOK, Pendapatan Hasil Pajak Rokok			337.309.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Kab. Purbalingga		168.359.000	DAK NF BOK, Pendapatan Hasil Pajak Rokok			176.777.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Kab. Purbalingga	70%	167.594.000	DAU		70%	168.000.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	1 dokumen	167.594.000	DAU		1 dokumen	168.000.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin	Kab. Purbalingga	100%	134.286.000	DAU, DAK NF BOK		100%	134.500.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	51 unit	3.750.000	DAU		51 unit	4.000.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.02.2.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	56 unit	5.000.000	DAU		56 unit	5.000.000	DINKES PPKB
1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	60 unit	125.536.000	DAU, DAK NF BOK		60 unit	125.500.000	DINKES PPKB
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Kab. Purbalingga	89,33%	1.034.569.000	DAU, DAK NF BOK		89,33%	1.034.659.000	DINKES PPKB	
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Kab. Purbalingga	100%				100%		DINKES PPKB	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	98%	5.260.000	DAU		98%	5.350.000	DINKES PPKB
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	24 dokumen	3.250.000	DAU		24 dokumen	3.250.000	DINKES PPKB
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	13 dokumen	2.010.000	DAU		13 dokumen	2.100.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Kab. Purbalingga	100%	200.179.000	DAU, DAK NF BOK		100%	200.179.000	DINKES PPKB
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	2098 orang	6.795.000	DAU		2098 orang	6.795.000	DINKES PPKB
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	5 dokumen	193.384.000	DAU, DAK NF BOK		5 dokumen	193.384.000	DINKES PPKB
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	Kab. Purbalingga	100%	829.130.000	DAU, DAK NF BOK		100%	829.130.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.03.2.03.0001	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	214 orang	829.130.000	DAU, DAK NF BOK		214 orang	829.130.000	DINKES PPKB
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	Kab. Purbalingga	100%	361.531.000	DAK NF POM		100%	361.531.000	DINKES PPKB
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Kab. Purbalingga	61%				61%		DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Kab. Purbalingga	100%	60.254.000	DAK NF POM		100%	60.254.000	DINKES PPKB
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	80 dokumen	60.254.000	DAK NF POM		80 dokumen	60.254.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	Kab. Purbalingga	35%	133.540.000	DAK NF POM		35%	133.540.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	55 dokumen	133.540.000	DAK NF POM		55 dokumen	133.540.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Kab. Purbalingga	100%	167.737.000	DAK NF POM		100%	167.737.000	DINKES PPKB
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	124 unit	167.737.000	DAK NF POM		124 unit	167.737.000	DINKES PPKB
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>91%</b>	<b>54.947.000</b>	<b>DAU, DAK NF BOK</b>		<b>91%</b>	<b>54.947.000</b>	<b>DINKES PPKB</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Kab. Purbalingga	100%	25.661.000	DAU		100%	25.661.000	DINKES PPKB
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 dokumen	25.661.000	DAU		4 dokumen	25.661.000	DINKES PPKB
1.02.05.2.02	Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat	Kab. Purbalingga	95,84%	26.986.000	DAU		95,84%	26.986.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.05.2.02.0001	Penyelengga raan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	3 dokumen	26.986.000	DAU		3 dokumen	26.986.000	DINKES PPKB
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi	Kab. Purbalingga	89,00%	2.300.000	DAK NF BOK		89,00%	2.300.000	DINKES PPKB
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembang an dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	6 dokumen	2.300.000	DAK NF BOK		6 dokumen	2.300.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.295.097.000				7.287.897.000	DINKES PPKB
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.295.097.000				7.287.897.000	DINKES PPKB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama (MKUP)	Kab. Purbalingga	21%	242.100.000			21%	234.900.000	DINKES PPKB
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase terpenuhinya Program Bangsa Kencana	Kab. Purbalingga	100%	17.120.000	DAU		100%	9.920.000	DINKES PPKB
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan dan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	3.957.000	DAU		1 kegiatan	3.957.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.14.02.2.01.0017		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	9.600.000	DAU		1 kegiatan	2.400.000	DINKES PPKB
2.14.02.2.01.0023		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	4 kegiatan	3.563.000	DAU		4 kegiatan	3.563.000	DINKES PPKB
2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan	Kab. Purbalingga	100%	224.980.000			100%	224.980.000	DINKES PPKB
2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	143.400.000	DAU, DAK NF BOKB		18 laporan	143.400.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2027				Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Kab. Purbalingga	12 dokumen	74.400.000	DAU, DAK NF BOKB		12 dokumen	74.400.000	DINKES PPKB
2.14.02.2.02.0027		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	Kab. Purbalingga	2 dokumen	7.180.000	DAU		2 dokumen	7.180.000	DINKES PPKB
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>		<b>Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>1,40%</b>	<b>1.943.254.000</b>			<b>1,40%</b>	<b>1.943.254.000</b>	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Kab. Purbalingga	19,20%	855.288.000			19,20%	855.288.000	DINKES PPKB
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	799.200.000	DAU, DAK NF BOKB		18 laporan	799.200.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBan gga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Purbalingga	3 dokumen	16.088.000	DAU		3 dokumen	16.088.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Kab. Purbalingga	1 organisasi	40.000.000	DAU, DAK NF BOKB		1 organisasi	40.000.000	DINKES PPKB
2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB	Kab. Purbalingga	100%	179.250.000			100%	179.250.000	DINKES PPKB
2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Purbalingga	1813 orang	179.250.000	DAU, DAK NF BOKB		1813 orang	179.250.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Kab. Purbalingga	90,20%	848.566.000			90,20%	848.566.000	DINKES PPKB
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Kab. Purbalingga	12 laporan	86.400.000	DAU, DAK NF BOKB		12 laporan	86.400.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Kab. Purbalingga	15000 orang	758.846.000	DAU, DAK NF BOKB		15000 orang	758.846.000	DINKES PPKB
2.14.03.2.03.0004		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	3.320.000	DAU		3 laporan	3.320.000	DINKES PPKB
2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Proporsi Kampung KB Mandiri	Kab. Purbalingga	0,84%	60.150.000			0,84%	60.150.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Purbalingga	7 unit	52.500.000	DAK NG BOKB		7 unit	52.500.000	DINKES PPKB
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Purbalingga	92 kampung	7.650.000	DAU		92 kampung	7.650.000	DINKES PPKB
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN</b>	<b>Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>98%</b>	<b>5.109.743.000</b>			<b>98%</b>	<b>5.109.743.000</b>	<b>DINKES PPKB</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan</b>	<b>Kab. Purbalingga</b>	<b>71%</b>				<b>71%</b>		<b>DINKES PPKB</b>
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kab. Purbalingga	83,82%	10.055.000			83,82%	10.055.000	DINKES PPKB
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	4.760.000	DAU		1 laporan	4.760.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	5.295.000	DAU		1 laporan	5.295.000	DINKES PPKB
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Kab. Purbalingga	100%	5.099.688.000			100%	5.099.688.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengampu	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Kab. Purbalingga	769 laporan	5.075.400.000	DAK NF BOKB		769 laporan	5.075.400.000	DINKES PPKB
2.14.04.2.02.0007		Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	7.538.000	DAU		3 laporan	7.538.000	DINKES PPKB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Catatan penting	Prakiraan Maju Tahun 2028		OPD Pengam pu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	16.750.000	DAU		1 laporan	16.750.000	DINKES PPKB

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Dalam penyusunannya, Renja ini juga telah memperhatikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat memberikan manfaat yang adil, setara, dan responsif bagi laki-laki dan perempuan, serta kelompok rentan lainnya.

Renja ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah maupun lintas sektor terkait. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, pengendalian, serta evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Purbalingga, 16 Februari 2026

KEPALA DINKESPPKB  
KABUPATEN PURBALINGGA



dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H

Pembina Tk I

NIP. 19700219 200212 1 004